SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN PASER

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN

Tahun 2025

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN
SEKRETARIAT DAERAH
TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Drs. KATSUL WIJAYA, M.Si

Jabatan : SEKRETARIS DAERAH

Selanjutnya disebut *Pihak Pertama*

Nama : dr. FAHMI FADLI

Jabatan : BUPATI PASER

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut *Pihak Kedua*

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Tana Paser, 2 0 ktober 2025

Pihak Kedua Bupati Paser	Pihak Pertama, Sekretaris Daerah
Dr. FAHMI FADLI	**Drs. KATSUL WIJAYA, M.Si** NIP. 19661211 198609 1 002

Lampiran 1 Perjanjian Kinerja

SEKRETARIAT DAERAH
PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN
TAHUN 2025

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Meningkatnya Kualitas Layanan Administrasi Umum	Rata-rata Nilai AKIP Perangkat Daerah	68,95
		Indeks Kepuasan Layanan Administrasi Umum	100
2	Meningkatnya Kualitas Rumusan Kebijakan Daerah Bidang Pemerintahan dan Kesra	Persentase hasil koordinasi kebijakan daerah bidang pemerintahan umum yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan perundang-undangan	100
		Persentase hasil koordinasi kebijakan daerah bidang Kesra yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan Perundang-undangan	100
3	Meningkatnya koordinasi kebujakan daerah bidang perekonomian dan pembangunan	Persentase hasil koordinasi kebijakan daerah bidang perekonomian dan pembangunan yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan Perundang-undangan	100

PROGRAM	ANGGARAN	KET
Program Penunjang Urusan Pemerintahan daerah Kabupaten/Kota	Rp. 138.520.273.902	
Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Rp. 48.335.617.244	
Program Perekonomian dan Pembangunan	Rp. 6.386.294.670	

Tana Paser, 20 Oktober 2025

Pihak Kedua
Bupati Paser

Dr. FAHMI FADLI

Pihak Pertama,
Sekretaris Daerah

Drs. KATSUL WIJAYA, M.Si
NIP. 19661211 198609 1 002

SEKRETARIAT DAERAH
PENJELASAN KINERJA PERUBAHAN
TAHUN 2025

Penjelasan Kinerja 1

Uraian Sasaran/

Yang dimaksud dalam sasaran kinerja ini adalah Bertujuan agar meningkatnya mutu Kualitas pelayanan Sekretariat Daerah baik secara administrasi lebih cepat, lebih mudah dan lebih terstruktur, atau memberikan kepuasan layanan agar pengguna layanan merasa puas atas pelayanan yang diberikan, dan menggunakan teknologi system digital untuk mempermudah pelayanan, serta mengembangkan Sumber Daya Manusia yang bertugas di bidang administrasi untuk meningkatkan keterampilan dan sikap kerja.

Indikator Kinerja

Sasaran kinerja ini memiliki 2 (dua) Indikator kinerja yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian /kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan, antara lain :

NO	URAIAN	RELEVANSI	FORMULASI	SUMBER DATA
1	Meningkatnya Kualitas Layanan Administrasi Umum	Rata-rata Nilai AKIP Perangkat Daerah	Jumlah nilai AKIP seluruh Perangkat Daerah di Bagi Jumlah Perangkat Daerah dikalikan 100 %	LHE SAKIP dari Inspektorat
		Indeks Kepuasan Layanan Administrasi Umum	Nilai IKM dari Ombudsman	Ombudsman

Target Kinerja

Dalam perjanjian kinerja ini, setiap indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut :

INDIKATOR KINERJA	TARGET	PENJELASAN
Rata-rata Nilai AKIP Perangkat Daerah	68,95	Target ini ditetapkan dengan melihat capaian beberapa tahun sebelumnya , dimana capaian tahun 2023 Nilai B, capaian tahun 2024 Nilai B, maka Tahun 2024 target rata ditetapkan 68,95
Indeks Kepuasan Layanan Administrasi Umum	100	Target ini ditetapkan dengan melihat capaian beberapa tahun sebelumnya , dimana capaian tahun 2023 Nilai 80, capaian tahun 2024 Nilai 85, maka Tahun 2024 target rata ditetapkan 100

Lampiran 2 Perjanjian Kinerja

SEKRETARIAT DAERAH
PENJELASAN KINERJA PERUBAHA
TAHUN 2025

Penjelasan Kinerja 2

Uraian Sasaran/

Yang dimaksud dalam sasaran kinerja ini adalah Bertujuan untuk memajukan pelayanan publik dan memperbaiki kesejahteraanb masyarakat secara keseluruhan peningkatan kualitas ini dapat dilihat dari beerapa aspek : - Perencanaan dan Penelitian yang lebih mendalam hal ini mencakup pengumpulan data akurat, analisi terhadap kondisi sosail, ekonomi, dan politik daerah serta identifikasi kelompok masyarakat yang paling membutuhkan perhatian, - Partisipasi Publik Pemerintah daerah melakukan berbagai kegiatan seperti diskusi Publik, Konsultasi, dan dengar pendapat agar masukan masyarakat dapat dipertimbangan dalam rumusan akhir kebijakan, Peningkatan Kapastitas Aparatur Pelatihan, Pendidikan dan pengembangan Profesional bagi aparatur pemerintahan membantu mereka lebih siap untuk menghadapi berbagai tantangan dalam perumusan kebijakan yang efektif dan efisien, -Transparansi dan Akuntabilitasi Pemerintah Daerah berupaya memberikan akses informasi yang luas, mesosialisasikan setiap proses tahapan kebijakan, - Penggunaan Teknologi Teknologi dapat digunakan untuk mengumpulkan data yang lebih cepat dan akurat, pemetaan masalah serta memfasilitasi partisipasi public secara daring, - Pementauan dan Evaluasi yang Konsisten jika terdapat kendala atau kelemahan dalam pelaksanaan evaluasi ini menjadi dasar untuk melakukan revisi atau penyesuaian kebijakan.

Indikator Kinerja

Sasaran kinerja ini memiliki 2 (dua) Indikator kinerja yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian /kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan, antara lain :

NO	URAIAN	RELEVANSI	FORMULASI	SUMBER DATA
1	Meningkatnya Kualitas Rumusan Kebijakan Daerah Bidang	Persentase hasil koordinasi kebijakan daerah bidang pemerintahan umum yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Jumlah hasil rapat-rapat koordinasi/konsultasi bidan pemerintahan umum yang dirumuskan menjadi draf Perda/perbup/surat keputusan kepala	Rekapitulasi draf produk Perundangan daerah dari bagian Hukum

	Pemerintahan dan Kesra	perundang-undangan	daerah/instruksi kepala daerah/surat edaran kepala daerah dibagi Jumlah rapat rapat koordinasi/konsultasi bidang pemerintahan umu dikalikan 100%	
		Persentase hasil koordinasi kebijakan daerah bidang Kesra yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan Perundang-undangan	Jumlah hasil rapat-rapat koordinasi/konsultasi bidang kesejahteraan rakyat yang dirumuskan menjadi draf Perda/perbup/surat keputusan kepala daerah/instruksi kepala daerah/surat edaran kepala daerah dibagi Jumlah rapat-rapat koordinasi/konsultasi bidang kesejahteraan rakyat dikalikan 100%	Rekapitulasi draf produk Perundangan daerah dari bagian Hukum

Target Kinerja

Dalam perjanjian kinerja ini, setiap indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut :

INDIKATOR KINERJA	TARGET	PENJELASAN
Persentase hasil koordinasi kebijakan daerah bidang pemerintahan umum yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan perundang-undangan	100	Target ini ditetapkan dengan melihat capaian beberapa tahun sebelumnya , dimana capaian tahun 2023 sebesar 85%, capaian tahun 2024 sebesar 90%, maka Tahun 2025 target rata ditetapkan 100 %
Persentase hasil koordinasi kebijakan daerah bidang Kesra yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan Perundang-undangan	100	Target ini ditetapkan dengan melihat capaian beberapa tahun sebelumnya , dimana capaian tahun 2023 Sebesar 85%, capaian tahun 2024 Sebesar 90%, maka Tahun 2025 target rata ditetapkan 100 %

Lampiran 2 Perjanjian Kinerja

SEKRETARIAT DAERAH
PENJELASAN KINERJA PERUBAHAN
TAHUN 2025

Penjelasan Kinerja 3

Uraian Sasaran/
Yang dimaksud dalam sasaran kinerja ini adalah Bertujuan untuk mencapai pembangunan yang terencana, efisien, dan efektif di seluruh wilayah, Koordinasi ini berarti ada sinergi antara berbagai pihak termasuk pemerintah daerah, Pemerintah Pusat, Lembaga terkait, dan pelaku ekonomi di daerah, untuk menyelaraskan kebijakan dan Program pembangunan ekonomi. Beberapa penjelasan mengenai bagaimana peningkatan koordinasi kebijakan ini berkontribusi terhadap kinerja dibidang perekonomian dan pembangunan ; - Menghindari Tumpang tindih dengan adanya koordinasi yang baik, - Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Koordinasi yang baik akan memungkinkan pembagian sumber daya secara optimal sesuai dengan kebutuhan daerah masing-masing, - Percepatan Pembangunan Insfrastruktur Koordinasi kebijakan dapat mempercepat pelaksanaan proyek-proyek Infrastruktur yang penting bagi pertumbuhan ekonomi, - Pengembangan Potensi Daerah Koordinasi kebijakan akan membantu daerah mengidentifikasi potensi unggulannya dan mendapat dukungan dari pemerintah Pusat, - Meningkatnya Daya saing Koordinasi ini memungkinkan daerah untuk lebih focus pada pengembangan sector-sektor strategis yang sesuai dengan keunggulan, - Perbaikan Stabilitas Ekonomi dan Sosial Koordinasi kebijakan juga berperan dalam menjaga stabilitasi ekonomi sosial di daerah .
Indikator Kinerja

Sasaran kinerja ini memiliki 2 (dua) Indikator kinerja yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian /kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan, antara lain :

NO	URAIAN	RELEVANSI	FORMULASI	SUMBER DATA
1	Meningkatnya koordinasi kebijakan daerah bidang perekonomian dan pembangunan	Persentase hasil koordinasi kebijakan daerah bidang perekonomian dan pembangunan yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan Perundang-undangan	Jumlah hasil rapat-rapat koordinasi/konsultasi bidan perekonomian dan pembangunan yang dirumuskan menjadi draf Perda/perbup/surat keputusan kepala daerah/instruksi kepala daerah/surat edaran kepala daerah dibagi Jumlah rapat rapat koordinasi/konsultasi	Rekapitulasi draf produk Perundangan daerah dari bagian Hukum

			bidang perekonomian dan pembangunan dikalikan 100%	

Target Kinerja

Dalam perjanjian kinerja ini, setiap indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut :

INDIKATOR KINERJA	TARGET	PENJELASAN
Persentase hasil koordinasi kebijakan daerah bidang perekonomian dan pembangunan yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan Perundang-undangan	100	Target ini ditetapkan dengan melihat capaian beberapa tahun sebelumnya , dimana capaian tahun 2023 sebesar 80%, capaian tahun 2024 sebesar 85%, maka Tahun 2025 target rata ditetapkan 100 %

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN
TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : AFRA NAHETHA, ST, MM

Jabatan : STAF AHLI BIDANG KEMASYARAKATAN DAN SUMBER DAYA MANUSIA

Selanjutnya disebut *Pihak Pertama*

Nama : dr. FAHMI FADLI

Jabatan : BUPATI PASER

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut *Pihak Kedua*

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Tana Paser, 2 0 Oktober 2025

Pihak Kedua,	Pihak Pertama,
BUPATI PASER	STAF AHLI BIDANG KEMASYARAKATAN DAN SUMBER DAYA MANUSIA
dr. FAHMI FADLI	**AFRA NAHETHA. ST. MM**
	NIP. 19740929 200312 2 002

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN
TAHUN 2025
STAF AHLI BIDANG KEMASYARAKATAN DAN SUMBER DAYA MANUSIA

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR SASARAN	TARGET
1	2	3	4
1	Tersusunnya Laporan yang berkaitan dengan Bidang Kemasyarakatn dan sumber daya manusia sesuai dengan konsep Akademis	1 Jumlah Laporan yang berkaitan dengan Bidang Kemasyarakatn dan sumber daya manusia	12 Laporan
2	Terlaksananya penyeliaan dan pengamatan pelaksanaan kebijakan pemerintah Kabupaten Paser bidang Kemasyarakatn dan sumber daya manusia dalam rangka penyampaian saran pertimbangan kepada bupati	2 Jumlah Laporan penyeliaan dan pengamatan pelaksanaan kebijakan pemerintah Kabupaten Paser bidang Kemasyarakatn dan sumber daya manusia	12 Laporan
3	Tersedianya kajian data sesuai ruang lingkup di bidang Kemasyarakatn dan sumber daya manusia dalam rangka pemecahan masalah dan pengembangan kebijakan	3 Jumlah dokumen kajian data sesuai ruang lingkup di bidang Kemasyarakatn dan sumber daya manusia	12 Laporan
4	Terselenggaranya pemberian bantuan substansi dan teknis pelaksanaan sosialisasi/bimbingan teknis serta rapat teknis dibidang Kemasyarakatn dan sumber daya manusia dalam rangka keberhasilan suatu kebijakan	4 Jumlah Laporan pemberian bantuan substansi dan teknis pelaksanaan sosialisasi/bimbingan teknis serta rapat teknis dibidang Kemasyarakatn dan sumber daya manusia	12 Laporan

Tana Paser, 20 Oktober 2025

Pihak Kedua,

BUPATI PASER

dr. FAHMI FADLI

Pihak Pertama,
STAF AHLI BIDANG
KEMASYARAKATAN DAN SUMBER
DAYA MANUSIA

AFRA NAHETHA, ST. MM
NIP. 19740929 200312 2 002

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN
TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Hj. INA ROSANA, S.Pi. M.Si

Jabatan : STAF AHLI BIDANG PEMBANGUNAN, EKONOMI DAN KEUANGAN

Selanjutnya disebut *Pihak Pertama*

Nama : dr. FAHMI FADLI

Jabatan : BUPATI PASER

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut *Pihak Kedua*

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Tana Paser, 2 0 Oktober 2025

Pihak Kedua Bupati Paser	Pihak Pertama STAF AHLI BIDANG PEMBANGUNAN, EKONOMI DAN KEUANGAN
dr. FAHMI FADLI	**Hj. INA ROSANA, S.Pi. M.Si** NIP. 19720322 199703 2 004

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN
TAHUN 2025
STAF AHLI BIDANG PEMBANGUNAN, EKONOMI DAN KEUANGAN

NO	SASARAN KINERJA INDIVIDU	INDIKATOR SASARAN KINERJA INDIVIDU		INDIKATOR SASARAN
1	2	3		4
1	Tersusunnya Laporan yang berkaitan dengan Bidang Pembangunan, ekonomi dan keuangan sesuai dengan konsep Akademis	1	Jumlah Laporan yang berkaitan dengan Bidang Pembangunan, ekonomi dan keuangan	12 Laporan
2	Terlaksananya penyeliaan dan pengamatan pelaksanaan kebijakan pemerintah Kabupaten Paser bidang Pembangunan, ekonomi dan keuangan dalam rangka penyampaian saran pertimbangan kepada bupati	2	Jumlah Laporan penyeliaan dan pengamatan pelaksanaan kebijakan pemerintah Kabupaten Paser bidang Pembangunan, ekonomi dan keuangan	12 Laporan
3	Tersedianya kajian data sesuai ruang lingkup di bidang Pembangunan, ekonomi dan keuangan dalam rangka pemecahan masalah dan pengembangan kebijakan	3	Jumlah dokumen kajian data sesuai ruang lingkup di bidang Pembangunan, ekonomi dan keuangan	12 Dokumen
4	Terselenggaranya pemberian bantuan substansi dan teknis pelaksanaan sosialisasi/bimbingan teknis serta rapat teknis dibidang Pembangunan, ekonomi dan keuangan dalam rangka keberhasilan suatu kebijakan	4	Jumlah Laporan pemberian bantuan substansi dan teknis pelaksanaan sosialisasi/bimbingan teknis serta rapat teknis dibidang Pembangunan, ekonomi dan keuangan	12 Laporan

Tana Paser, 20 Oktober 2025

Pihak Kedua
BUPATI PASER

dr. FAHMI FADLI

Pihak Pertama
STAF AHLI BIDANG PEMBANGUNAN,
EKONOMI DAN KEUANGAN

Hj. INA ROSANA, S.Pi. M.Si
NIP. 19720322 199703 2 004

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN
TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ir. AMIRUDDIN A, M.AP

Jabatan : STAF AHLI BIDANG PEMERINTAHAN, HUKUM DAN POLITIK

Selanjutnya disebut *Pihak Pertama*

Nama : dr. FAHMI FADLI

Jabatan : BUPATI PASER

Selanjutnya disebut *Pihak Kedua*

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Tana Paser, Oktober 2025

Pihak Kedua BUPATI PASER	Pihak Pertama STAF AHLI BIDANG PEMERINTAHAN, HUKUM DAN POLITIK
dr. FAHMI FADLI	**Ir. AMIRUDDIN A, M.AP** NIP. 19660625 199603 1 001

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN
TAHUN 2025
STAF AHLI BIDANG PEMERINTAHAN, HUKUM DAN POLITIK

NO	SASARAN KINERJA INDIVIDU	INDIKATOR SASARAN KINERJA INDIVIDU	TARGET
1	2	3	4
1	Tersusunnya Laporan yang berkaitan dengan Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik sesuai dengan konsep Akademis	Jumlah Laporan yang berkaitan dengan Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik	12 Laporan
2	Terlaksananya penyeliaan dan pengamatan pelaksanaan kebijakan pemerintah Kabupaten Paser bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik dalam rangka penyampaian saran pertimbangan kepada bupati	Jumlah Laporan penyeliaan dan pengamatan pelaksanaan kebijakan pemerintah Kabupaten Paser bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik	12 Laporan
3	Tersedianya kajian data sesuai ruang lingkup di bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik dalam rangka pemecahan masalah dan pengembangan kebijakan	Jumlah dokumen kajian data sesuai ruang lingkup di bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik	12 Laporan
4	Terselenggaranya pemberian bantuan substansi dan teknis pelaksanaan sosialisasi/bimbingan teknis serta rapat teknis dibidang Pemerintahan, Hukum dan Politik dalam rangka keberhasilan suatu kebijakan	Jumlah Laporan pemberian bantuan substansi dan teknis pelaksanaan sosialisasi/bimbingan teknis serta rapat teknis dibidang Pemerintahan, Hukum dan Politik	12 Laporan

Tana Paser, 20 Oktober 2025

Pihak Kedua
BUPATI PASER

dr. FAHMI FADLI

Pihak Pertama
STAF AHLI BIDANG PEMERINTAHAN,
HUKUM DAN POLITIK

Ir. AMIRUDDIN A, M.AP
NIP. 19660625 199603 1 001

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN
SEKRETARIAT DAERAH
TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : IR. ROMIF ERWINADI, M.SI

Jabatan : ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT

Selanjutnya disebut *Pihak Pertama*

Nama : Drs. KATSUL WIJAYA, M.Si

Jabatan : SEKRETARIS DAERAH

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut *Pihak Kedua*

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Tana Paser, 2 0 Oktober 2025

Pihak Kedua	Pihak Pertama
SEKRETARIS DAERAH	ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
Drs. KATSUL WIJAYA,M.Si	**IR. ROMIF ERWINADI, M.SI**
NIP. 196612111986091002	NIP. 19680818 199310 1 002

Lampiran 1 Perjanjian Kinerja

SEKRETARIAT DAERAH
PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN
TAHUN 2025

NO	SASARAN KINERJA PROGRAM	INDIKATOR SASARAN	TARGET
1	2	3	4
1	Meningkatnya Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	1 Persentase Perumusan Kebijakan pemerintahan dan Kesra yang ditindak lanjuti 2 Nilai EKPPD	100 Persen

NO	PROGRAM	ANGGARAN	KET
1	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Rp. 48.335.617.244	

Tana Paser, 20 Oktober 2025

Pihak Kedua
SEKRETARIS DAERAH

Drs. KATSUL WIJAYA,M.Si
NIP. 196612111986091002

Pihak Pertama
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT

IR. ROMIF ERWINADI, M.SI
NIP. 19680818 199310 1 002

SEKRETARIAT DAERAH
PENJELASAN KINERJA
TAHUN 2025

Penjelasan Kinerja 1

Uraian Sasaran/

Yang dimaksud dalam sasaran kinerja ini adalah Kinerja ini bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat dan memastikan semua warga negara mendapatkan hak-hak dasar mereka termasuk Pendidikan, Kesehatan dan perlindungan sosial. Kinerja program ini dapat dilihat dari seberapa efektif kebijakan tersebut mencapai tujuan tersebut

Indikator Kinerja

Sasaran kinerja ini memiliki 2 (dua) Indikator kinerja yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian /kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan, antara lain :

NO	URAIAN	RELEVANSI	FORMULASI	SUMBER DATA
1	Persentase Perumusan Kebijakan pemerintahan dan Kesra yang ditindak lanjuti	Persentase Perumusan Kebijakan pemerintahan dan Kesra yang ditindak lanjuti dianggap relevan,karena tujuan utamanya adalah untuk mengukur seberapa efektif kebijakan yang dirumuskan benar-benar diterapkan atau dijalankan, infikator ini harus memuat beberapa hal agar dapat relevan antara lain; Tujuan kebijakan jelas, Kualitas tindak lanjut, Sesuai dengan prioritas Pemerintah	Jumlah hasil rapat-rapat koordinasi/konsultasi bidang Pemerintahan Umum yang dirumuskan menjadi Usulan draf Perda/perbup/surat keputusan kepala daerah/instruksi kepala daerah/surat edaran kepala daerah dibagi Jumlah rapat-rapat koordinasi/konsultasi bidang perekonomian dan pembangunan di tindak lanjuti dikalikan 100%	Rekapitulasi draf produk Perundangan daerah dari bagian Hukum

	Nilai EKPPD	Indikator Kinerja Nilai EKPPD sangat relevan karena sebagai alat untuk menilai kinerja pemerintah daerah (PEMDA) dalam menjalankan fungsi administrasi, pelayanan public, dan kebijakan. EKPPD bertujuan untuk mengukut seberapa efektif PEMDA dalam mencapai tujuanb pembangunan, pemanfaatan anggaran, serta efisiensi dan kualitas pelayan publik		

Target Kinerja

Dalam perjanjian kinerja ini, setiap indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut :

INDIKATOR KINERJA=	TARGET	PENJELASAN
Persentase Perumusan Kebijakan pemerintahan dan Kesra yang ditindak lanjuti	100 %	Target ini ditetapkan dengan melihat capaian beberapa tahun sebelumnya , dimana capaian tahun 2023 sebesar 100%, capaian tahun 2024 sebesar 100%, maka target rata ditetapkan 100 %
Nilai EKPPD	3.07	Target ini ditetapkan dengan melihat capaian beberapa tahun sebelumnya , dimana capaian tahun 2023 sebesar 2,75, capaian tahun 2024 sebesar 2,75, maka target rata ditetapkan 3,07

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN
SEKRETARIAT DAERAH
TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ANDI AZIS, SH

Jabatan : KEPALA BAGIAN HUKUM

Selanjutnya disebut *Pihak Pertama*

Nama : IR. ROMIF ERWINADI, M.SI

Jabatan : ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJATERAAN RAKYAT

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut *Pihak Kedua*

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Tana Paser, 20 Oktober 2025

Pihak Kedua	Pihak Pertama
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJATERAAN RAKYAT	KEPALA BAGIAN HUKUM
IR. ROMIF ERWINADI, M.SI	**ANDI AZIS, SH**
NIP. 19680818 199310 1 002	NIP. 196808161998031007

Lampiran 1 Perjanjian Kinerja

SEKRETARIAT DAERAH
PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN
TAHUN 2025

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	1 Persentase Koordinasi Hukum yang Terfasilitasi	100 persen

NO	KEGIATAN	ANGGARAN
1	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Rp. 3.271.372.590

Tana Paser, 20 Oktober 2025

Pihak Kedua
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN
KESEJATERAAN RAKYAT

IR. ROMIF ERWINADI, M.SI
NIP. 19680818 199310 1 002

Pihak Pertama
KEPALA BAGIAN HUKUM

ANDI AZIS, SH
NIP. 196808161998031007

Lampiran 2 Perjanjian Kinerja

SEKRETARIAT DAERAH
PENJELASAN KINERJA PERUBAHAN
TAHUN 2025

Penjelasan Kinerja 1

Uraian Sasaran/

Yang dimaksud dalam sasaran kinerja ini adalah Kegiatan atau proses yang berfokus pada pada meningkatkan efektivitas, keselarasan, dan kepatuhan dalam pelaksanaan hukum disuatu Lembaga atau wilayah, bertujuan untuk memastikan bahwa semua pihak dapat berkerjasam secara efisien dan konsisten dengan aturan hukum yang berlaku. Kinerja yang baik dalam fasilitasi dan koordinasi hukum akan mendorong terlaksananya system hukum yang lebih teratur, transparan, dam akuntabel

Indikator Kinerja

Sasaran kinerja ini memiliki 1 (satu) Indikator kinerja yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian /kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan, antara lain :

NO	URAIAN	RELEVANSI	FORMULASI	SUMBER DATA
1	Persentase Koordinasi Hukum yang Terfasilitasi	Indikator Persentase Koordinasi Hukum yang Terfasilitasi sangat relevan dalam konteks Lembaga atau organisasi yang bertugas mengoordinasikan peraturan hukum di antara berbagai pihak. Indikator ini dapat menunjukkan seberapa efektif upaya fasilitasi koordinasi hukum yang telah dilakukan.	Jumlah Koordinasi Hukum yang terfasilitasi di bagi total rencana koordinasi hukum di kali seratus persen	Rekapitulasi draf produk Perundangan daerah dari bagian Hukum

Target Kinerja

Dalam perjanjian kinerja ini, setiap indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut :

INDIKATOR KINERJA	TARGET	PENJELASAN
Persentase Koordinasi Hukum yang Terfasilitasi	100 %	Target ini ditetapkan dengan melihat capaian beberapa tahun sebelumnya dimana capaian tahun 2023 sebesar 100%, capaian tahun 2024 sebesar 100%, maka target rata ditetapkan 100 %

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN
SEKRETARIAT DAERAH
TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : MUHAMMAD FAUZAN ANSHARY, SH. M.SI

Jabatan : ANALIS HUKUM AHLI MUDA

Selanjutnya disebut *Pihak Pertama*

Nama : ANDI AZIS, SH

Jabatan : KEPALA BAGIAN HUKUM

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut *Pihak Kedua*

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Tana Paser, 20 Oktober 2025

Pihak Kedua,	Pihak Pertama,
KEPALA BAGIAN HUKUM	ANALIS HUKUM AHLI MUDA
ANDI AZIS, SH	**MUHAMMAD FAUZAN ANSHARY, SH. M.SI**
NIP. 196808161998031007	NIP. 19810820 200312 1 006

Lampiran 1 Perjanjian Kinerja

SEKRETARIAT DAERAH
PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN
TAHUN 2025

NO	SASARAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA		TARGET
1	2		3	4
1	Terlaksananya Fasilitasi Bantuan Hukum	1	Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum	3 kasus

NO	SUB KEGIATAN	ANGGARAN
1	Fasilitasi Bantuan Hukum	Rp. 2.431.135.984

Tana Paser, 20 Oktober 2025

Pihak Kedua,
KEPALA BAGIAN HUKUM

ANDI AZIS, SH
NIP. 196808161998031007

Pihak Pertama,
ANALIS HUKUM AHLI MUDA

MUHAMMAD FAUZAN ANSHARY, SH. M.SI
NIP. 19810820 200312 1 006

Lampiran 2 Perjanjian Kinerja

SEKRETARIAT DAERAH
PENJELASAN KINERJA
TAHUN 2025

Penjelasan Kinerja 1

Uraian Sasaran/

Yang dimaksud dalam sasaran kinerja ini adalah Kegiatan atau proses yang berfokus pada bantuan hukum untuk masyarakat bagi kelompok yang kurang mampu atau rentan dan harus memperhatikan aspek penting dalam kinerja fasilitasi bantuan hukum, pemerintah atau Lembaga.

Indikator Kinerja

Sasaran kinerja ini memiliki 1 (satu) Indikator kinerja yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian /kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan, antara lain :

NO	URAIAN	RELEVANSI	FORMULASI	SUMBER DATA
1	Jumlah Kasus yang mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum	Indikator Jumlah Kasus yang mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum Persentase Koordinasi Hukum yang sangat relevan untuk menilai efektivitas program bantuan hukum dalam membantu masyarakat yang membutuhkan akses keadilan terutama bagi kelompok yang memiliki keterbatasan akses hukum	Jumlah kasus yang di fasilitasi di bagi jumlah kasus yang mengajukan permohonan bantuan hukum dikali 100	Rekapitulasi draf produk Perundangan daerah dari bagian Hukum

Target Kinerja

Dalam perjanjian kinerja ini, setiap indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut :

INDIKATOR KINERJA	TARGET	PENJELASAN
Jumlah Kasus yang mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum	3	Target ini ditetapkan dengan melihat capaian beberapa tahun sebelumnya dimana capaian tahun 2023 sebesar 2, capaian tahun 2024 sebesar 2, maka target rata ditetapkan 3

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN
SEKRETARIAT DAERAH
TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : SYAHRANI BUDIANSYAH, SH

Jabatan : ANALIS HUKUM AHLI MUDA

Selanjutnya disebut *Pihak Pertama*

Nama : ANDI AZIS, SH

Jabatan : KEPALA BAGIAN HUKUM

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut *Pihak Kedua*

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Tana Paser, 20 Oktober 2025

Pihak Kedua, KEPALA BAGIAN HUKUM	Pihak Pertama, ANALIS HUKUM AHLI MUDA
ANDI AZIS, SH	**SYAHRANI BUDIANSYAH, SH**
NIP. 196808161998031007	NIP. 19730914 200312 1 004

Lampiran 1 Perjanjian Kinerja

SEKRETARIAT DAERAH
PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN
TAHUN 2025

NO	SASARAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Terlaksananya Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	1 Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi	dokumen

NO	SUB KEGIATAN	ANGGARAN
1	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Rp. 257.069.972

Tana Paser, 20 Oktober 2025

Pihak Kedua,
KEPALA BAGIAN HUKUM

ANDI AZIS, SH
NIP. 196808161998031007

Pihak Pertama,
ANALIS HUKUM AHLI MUDA

SYAHRANI BUDIANSYAH, SH
NIP. 19730914 200312 1 004

Lampiran 2 Perjanjian Kinerja

SEKRETARIAT DAERAH
PENJELASAN KINERJA
TAHUN 2025

Penjelasan Kinerja 1

Uraian Sasaran/

Yang dimaksud dalam sasaran kinerja ini adalah Proses Pengaturan, Penyimpanan, serta distribusi informasi hukum dan dokumen. Secara keseluruhan kinerja yang baik dalam pendokumentasian dan pengelolaan informasi hukum mendukung transparasi hukum, mempermudah akses bagi masyarakat, dan meningkatkan efisiensi dalam mengelola produk hukum.

Indikator Kinerja

Sasaran kinerja ini memiliki 1 (satu) Indikator kinerja yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian /kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan, antara lain :

NO	URAIAN	RELEVANSI	FORMULASI	SUMBER DATA
1	Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi	Indikator Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi ini sangat relevan menunjukkan seberapa aktif Lembaga dalam Menyusun dan menerbitkan produk hukum, baik dalam bentuk peraturan, keputusan maupun regulasi lainnya, dan indikator ini menunjukkan upaya Lembaga dalam		Rekapitulasi draf produk Perundangan daerah dari bagian Hukum

		mengarsipkan, mendokumentasikan dan menyediakan akses terhadap produk hukum yang ada agar masyakat dapat dengan mudah mengaksesnya.		

Target Kinerja

Dalam perjanjian kinerja ini, setiap indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut :

INDIKATOR KINERJA	**TARGET**	**PENJELASAN**
Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi	100 %	Target ini ditetapkan dengan melihat capaian beberapa tahun sebelumnya dimana capaian tahun 2023 sebesar 100%, capaian tahun 2024 sebesar 100%, maka target rata ditetapkan 100 %

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN
SEKRETARIAT DAERAH
TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : TITIEK ARYTHA PRIHATIN, SH

Jabatan : ANALIS HUKUM AHLI MUDA

Selanjutnya disebut *Pihak Pertama*

Nama : ANDI AZIS, SH

Jabatan : KEPALA BAGIAN HUKUM

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut *Pihak Kedua*

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Tana Paser, 20 Oktober 2025

Pihak Kedua,	Pihak Pertama,
KEPALA BAGIAN HUKUM	ANALIS HUKUM AHLI MUDA
ANDI AZIS, SH	**TITIEK ARYTHA PRIHATIN, SH**
NIP. 196808161998031007	NIP. 19780424 201001 2 011

Lampiran 1 Perjanjian Kinerja

SEKRETARIAT DAERAH
PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN
TAHUN 2025

NO	SASARAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Terfasilitasinya Penyusunan Produk Hukum Daerah	1 Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun	850 dokumen

NO	SUB KEGIATAN	ANGGARAN
1	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Rp. 583.166.634

Tana Paser, 20 Oktober 2025

Pihak Kedua,
KEPALA BAGIAN HUKUM

ANDI AZIS, SH
NIP. 196808161998031007

Pihak Pertama,
ANALIS HUKUM AHLI MUDA

TITIEK ARYTHA PRIHATIN, SH
NIP. 19780424 201001 2 011

Lampiran 2 Perjanjian Kinerja

SEKRETARIAT DAERAH
PENJELASAN KINERJA
TAHUN 2025

Penjelasan Kinerja 1

Uraian Sasaran/

Yang dimaksud dalam sasaran kinerja ini adalah Proses yang dilakukan oleh pemerintah daerah untuk membantu dan mendukung penyusunan, perumusan dan pembentukan peraturan perundang-undangan ditingkat daerah. Fasilitasi ini bertujuan agar produk hukum daerah yang dihasilkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, efektif dan dapat dijalankan dengan baik oleh masyarakat dan pemerintah daerah

Indikator Kinerja

Sasaran kinerja ini memiliki 1 (satu) Indikator kinerja yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian /kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan, antara lain :

NO	URAIAN	RELEVANSI	FORMULASI	SUMBER DATA
1	Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun	Indikator Jumlah Produk Hukum daerah yang disusun sangat relevan menunjukkan bahwa produk hukum yang disusun merujuk pada beberapa peraturan daerah, Keputusan Kepala Daerah atau regulasi lokal, yang berfungsi untuk mendukung tercapainya tujuan dan kebijakan daerah.	Jumlah produk hukum yang di susun di bagi jumlah produk hukum yang di rencanakan kali seratus	Rekapitulasi draf produk Perundangan daerah dari bagian Hukum

Target Kinerja

Dalam perjanjian kinerja ini, setiap indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut :

INDIKATOR KINERJA	TARGET	PENJELASAN
Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun	850	Target ini ditetapkan dengan melihat capaian beberapa tahun sebelumnya dimana capaian tahun 2023 sebesar 750, capaian tahun 2024 sebesar 750, maka target rata ditetapkan 850

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN
SEKRETARIAT DAERAH
TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : PAMARDI BAYUAJI, S.Sos. M.Si

Jabatan : KEPALA BAGIAN TATA PEMERINTAHAN

Selanjutnya disebut *Pihak Pertama*

Nama : H. Ir. ROMIF ERWINADI, M.Si

Jabatan : ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut *Pihak Kedua*

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Tana Paser, 20 Oktober 2025

Pihak Kedua	Pihak Pertama
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJATERAAN RAKYAT	KEPALA BAGIAN TATA PEMERINTAHAN
H. Ir. ROMIF ERWINADI, M.Si	**PAMARDI BAYUAJI, S.Sos. M.Si**
NIP. 19680818 199310 1 002	NIP. 19711206 199103 1 001

Lampiran 1 Perjanjian Kinerja

SEKRETARIAT DAERAH
PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN
TAHUN 2025

NO	SASARAN KINERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Administrasi Tata Pemerintahan	1 Cakupan Administrasi Pemerintahan dan Kewilayahan yang terfasilitasi	100 Persen

NO	KEGIATAN	ANGGARAN
1	Administrasi Tata Pemerintahan	Rp. 4.087.549.096
	Penataan Administrasi Pemerintahan	
	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	
	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	

Tana Paser, 20 Oktober 2025

Pihak Kedua	Pihak Pertama
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJATERAAN RAKYAT	KEPALA BAGIAN TATA PEMERINTAHAN
H. Ir. ROMIF ERWINADI, M.Si	**PAMARDI BAYUAJI, S.Sos. M.Si**
NIP. 19680818 199310 1 002	NIP. 19711206 199103 1 001

Lampiran 2 Perjanjian Kinerja

SEKRETARIAT DAERAH
PENJELASAN KINERJA
TAHUN 2025

Penjelasan Kinerja 1

Uraian Sasaran/

Yang dimaksud dalam sasaran kinerja ini merujuk pada efektivitas, efisiensi, dan kualitas pelayanan dalam pelaksanaan tugas-tugas pemerintah. Secara umum kinerja ini meliputi berbagai aspek, termasuk pengelolaan sumber daya, pelayanan public, perumusan kebijakan, serta penerapan peraturan

Indikator Kinerja

Sasaran kinerja ini memiliki 1 (satu) Indikator kinerja yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian /kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan, antara lain :

NO	URAIAN	RELEVANSI	FORMULASI	SUMBER DATA
1	Cakupan Administrasi Pemerintahan dan Kewilayahan yang terfasilitasi	Indikator Cakupan Administrasi Pemerintahan dan Kewilayahan yang terfasilitasi relevan karena di ukur dengan mempertimbangkan beberapa aspek penting, seperti tingkat layanan yang diberikan, efisiensi, efektivitas, dan kepatuhan terhadap standar pelayanan minimum. Relevansi ini penting untuk memastikan bahwa semua wilayah mendapatkan akses pelayanan, serta	Jumlah cakupan wilayah yang terfasilitasi di bagi jumlah target dikali 100	Bagian Tata Pemerintahan

		proses administrasi yang lancar.		

Target Kinerja

Dalam perjanjian kinerja ini, setiap indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut :

INDIKATOR KINERJA	**TARGET**	**PENJELASAN**
Cakupan Administrasi Pemerintahan dan Kewilayahan yang terfasilitasi	100 %	Target ini ditetapkan dengan melihat capaian beberapa tahun sebelumnya dimana capaian tahun 2023 sebesar 100%, capaian tahun 2024 sebesar 100%, maka target rata ditetapkan 100 %

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN
SEKRETARIAT DAERAH
TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dr. SORAYA JA, SE. M.Si

Jabatan : KEPALA BAGIAN KERJASAMA

Selanjutnya disebut *Pihak Pertama*

Nama : H. Ir. ROMIF ERWINADI, M.Si

Jabatan : ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJATERAAN RAKYAT

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut *Pihak Kedua*

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Tana Paser, 20 Oktober 2025

Pihak Kedua	Pihak pPertama
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	KEPALA BAGIAN KERJASAMA
H. Ir. ROMIF ERWINADI, M.Si	**Dr. SORAYA JA, SE. M.Si**
NIP. NIP. 19680818 199310 1 002	NIP. 19680818 199903 2 005

Lampiran 1 Perjanjian Kinerja

SEKRETARIAT DAERAH
PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN
TAHUN 2025

NO	SASARAN KINERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Fasilitasi Kerjasama Daerah	1 Cakupan Kerjasama Daerah yang terfasilitasi	54 Persen

NO	KEGIATAN	ANGGARAN
1	Fasilitasi Kerjasama Daerah	Rp. 760.568.235
	Fasilitasi Kerja sama Dalam Negeri dan Luar Negeri	

Tana Paser, 20 Oktober 2025

Pihak Kedua	Pihak Pertama
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	KEPALA BAGIAN KERJASAMA
H. Ir. ROMIF ERWINADI, M.Si	**Dr. SORAYA JA, SE. M.Si**
NIP. NIP. 19680818 199310 1 002	NIP. 19680818 199903 2 005

SEKRETARIAT DAERAH
PENJELASAN KINERJA
TAHUN 2025

Penjelasan Kinerja 1

Uraian Sasaran/

Yang dimaksud dalam sasaran kinerja ini mengacu pada bagaimana suatu pemerintah daerah dapat mendorong, mengatur dan mengoptimalkan kerja sama antara satu daerah dengan daerah lain atau antara daerah dengan pihak lain. Fasilitasi kerja sama ini penting untuk memperkuat pembangunan daerah, efisiensi pelayanan public, serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang saling menguntungkan.

Indikator Kinerja

Sasaran kinerja ini memiliki 1 (satu) Indikator kinerja yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian /kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan, antara lain :

NO	URAIAN	RELEVANSI	FORMULASI	SUMBER DATA
1	Cakupan Kerjasama Daerah yang terfasilitasi	Indikator Cakupan Kerjasama Daerah yang terfasilitasi sangat relevan dalam mengukur seberapa banyak atau efektifnya kerjasama antar daerah yang telah terjalin. Indikator ini penting untuk memastikan bahwa pemerintah daerah aktif dalam kolaborasi untuk mencapai tujuan pembangunan yang lebih luas dan sumber daya yang ada di daerah	*Jumlah cakupan wilayah yang terfasilitasi di bagi jumlah target dikali 100*	Bagian Kerjasama

Target Kinerja

Dalam perjanjian kinerja ini, setiap indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut :

INDIKATOR KINERJA	TARGET	PENJELASAN
Cakupan Kerjasama Daerah yang terfasilitasi	50	Target ini ditetapkan dengan melihat capaian beberapa tahun sebelumnya dimana capaian tahun 2023 sebesar 50, capaian tahun 2024 sebesar 54, maka target rata ditetapkan 54

PERJANJIAN KINERJA
SEKRETARIAT DAERAH
TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ERNA SJACHRAINI, S. Sos

Jabatan : ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA

Selanjutnya disebut *Pihak Pertama*

Nama : Dr. SORAYA JA, SE. M.Si

Jabatan : KEPALA BAGIAN KERJASAMA

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut *Pihak Kedua*

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Tana Paser, 20 Oktober 2025

Pihak Kedua	Pihak Pertama,
KEPALA BAGIAN KERJASAMA	ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA
Dr. SORAYA JA, SE. M.Si	**ERNA SJACHRAINI,S.Sos**
NIP. 19680818 199903 2 005	NIP. 19810208 200903 2 004

Lampiran 1 Perjanjian Kinerja

SEKRETARIAT DAERAH
PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN
TAHUN 2025

NO	SASARAN KINERJA SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Terlaksananya Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	1 Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	12 Laporan

NO	SUB KEGIATAN	ANGGARAN
1	Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	Rp. 341.303.235

Tana Paser, 20 Oktober 2025

Pihak Kedua
KEPALA BAGIAN KERJASAMA

Dr. SORAYA JA, SE. M.Si
NIP. 19680818 199903 2 005

Pihak Pertama,
ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA

ERNA SJACHRAINI,S.Sos
NIP. 19810208 200903 2 004

Lampiran 2 Perjanjian Kinerja

SEKRETARIAT DAERAH
PENJELASAN KINERJA
TAHUN 2025

Penjelasan Kinerja 1

Uraian Sasaran/

Yang dimaksud dalam sasaran kinerja ini adalah menilai dan me analisi terhadapt sejauh mana kerja sama yang dijalankan apakah telah mencapai tujuan dan target yang telah di tetapkan. Tujuan evaluasi ini adalah untuk menilai efektivitas, efisiensi, serta manfaat dari Kerjasama yang dilakukan oleh pihak pihak yang terlibat.

Indikator Kinerja

Sasaran kinerja ini memiliki 1 (satu) Indikator kinerja yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian /kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan, antara lain :

NO	URAIAN	RELEVANSI	FORMULASI	SUMBER DATA
1	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	Indicator Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama di lihat sangat relevan karena indicator ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana pelaksanaan kerja sama telah di analisis dan di review secara berkala, guna untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi kerja sama tersebut	*Jumlah Laporan yang di evaluasi*	Bagian Kerjasama

Target Kinerja

Dalam perjanjian kinerja ini, setiap indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut :

INDIKATOR KINERJA	TARGET	PENJELASAN
Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	12	Target ini ditetapkan dengan melihat capaian beberapa tahun sebelumnya , dimana capaian tahun 2023 sebesar 12, capaian tahun 2024 sebesar 12, maka target rata ditetapkan 12

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN
SEKRETARIAT DAERAH
TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : SABERI, S.ST

Jabatan : KEPALA BAGIAN KESEJATERAAN RAKYAT

Selanjutnya disebut *Pihak Pertama*

Nama : H. Ir. ROMIF ERWINADI, M.Si

Jabatan : ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJATERAAN RAKYAT

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut *Pihak Kedua*

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Tana Paser, 20 Oktober 2025

Pihak Kedua	Pihak Pertama
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJATERAAN RAKYAT	KEPALA BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT,
H. Ir. ROMIF ERWINADI, M.SI	**SABERI. S.ST**
NIP. 19680818 199310 1 002	NIP. 19700523 199401 1 001

Lampiran 1 Perjanjian Kinerja

SEKRETARIAT DAERAH
PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN
TAHUN 2025

NO	SASARAN KINERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	1 Jumlah Koordinasi, Fasilitasi dan Monev dalam menyusun Kebijakan	100 Persen

NO	KEGIATAN	ANGGARAN
1	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Rp. 40.216.127.323
	a. Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi dan Capaian Kinerja Terkait kesejahteraan social	
	b. Pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan capaian kinerja terkait kesejahteraan masyarakat	

Tana Paser, 20 Oktober 2025

Pihak Kedua
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJATERAAN RAKYAT

H. Ir. ROMIF ERWINADI, M.Si
NIP. 19680818 199310 1 002

Pihak Pertama
KEPALA BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT,

SABERI. S.ST
NIP. 19700523 199401 1 001

Lampiran 2 Perjanjian Kinerja

SEKRETARIAT DAERAH
PENJELASAN KINERJA
TAHUN 2025

Penjelasan Kinerja 1

Uraian Sasaran/

Yang dimaksud dalam sasaran kinerja ini adalah suatu kegiatan yang mengacu sejauh mana pemerintah berhasil menerapkan program dan kebijakan yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat, kebijakan ini biasanya mencakup Kesehatan, Pendidikan, jaminan social, pengentasan kemiskinan, perumahan dan peningkatan lapangan kerja. Kinerja ini juga di pelukan koordinasi yang efektif antara pemerintah dengan masyarakat, serta penyaluran anggaran yang tepat sasaran.

Indikator Kinerja

Sasaran kinerja ini memiliki 1 (satu) Indikator kinerja yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian /kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan, antara lain :

NO	URAIAN	RELEVANSI	FORMULASI	SUMBER DATA
1	Jumlah Koordinasi, Fasilitasi dan Monev dalam menyusun Kebijakan	Indicator Jumlah Koordinasi, Fasilitasi dan Monev dalam menyusun Kebijakan bisa dikatakan relevan karena indicator ini bertujuan untuk menilai sejauh mana upaya pemerintah dalam proses penyusunan kebijakan dan memastikan sebelum Menyusun kebijakan pemerintah melakukan koordinasi dengan pihak terkait	*Jumlah koordinasi + jumlah fasilitasi + jumlah monev*	Bagian Kesra

Target Kinerja

Dalam perjanjian kinerja ini, setiap indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut :

INDIKATOR KINERJA	TARGET	PENJELASAN
Jumlah Koordinasi, Fasilitasi dan Monev dalam menyusun Kebijakan	100	Target ini ditetapkan dengan melihat capaian beberapa tahun sebelumnya dimana capaian tahun 2023 sebesar 100, capaian tahun 2024 sebesar 100, maka target rata ditetapkan 100

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN
SEKRETARIAT DAERAH
TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : MUSALI, SP

Jabatan : ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA

Selanjutnya disebut *Pihak Pertama*

Nama : SABERI, S.ST

Jabatan : KEPALA BAGIAN KESEJATERAAN RAKYAT

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut *Pihak Kedua*

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Tana Paser, 20 Oktober 2025

Pihak Kedua,	Pihak Pertama,
KEPALA BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT,	ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA
SABERI. S.ST	**MUSALI, SP**
NIP. 19700523 199401 1 001	NIP. 19710614 200212 1 005

Lampiran 1 Perjanjian Kinerja

SEKRETARIAT DAERAH
PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN
TAHUN 2025

NO	SASARAN KINERJA SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	1. Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	400 dokumen

NO	SUB KEGIATAN	ANGGARAN
1	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Rp. 32.766.531.597

Tana Paser, 20 Oktober 2025

Pihak Kedua,
KEPALA BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT,

SABERI. S.ST
NIP. 19700523 199401 1 001

Pihak Pertama,
ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA,

MUSALI, SP
NIP. 19710614 200212 1 005

Lampiran 2 Perjanjian Kinerja

SEKRETARIAT DAERAH
PENJELASAN KINERJA
TAHUN 2025

Penjelasan Kinerja 1

Uraian Sasaran/

Yang dimaksud dalam sasaran kinerja ini adalah kegiatan yang mempunyai tujuan utnuk meningkatkan kesejahteraan masyakat baik di bidang Pendidikan dan keagamaan yang tepat sasaran.

Indikator Kinerja

Sasaran kinerja ini memiliki 1 (satu) Indikator kinerja yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian /kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan, antara lain :

NO	URAIAN	RELEVANSI	FORMULASI	SUMBER DATA
1	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Indicator Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	*Jumlah dokumen di bagi jumlah kegiatan*	Bagian Kesra

Target Kinerja

Dalam perjanjian kinerja ini, setiap indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut :

INDIKATOR KINERJA	TARGET	PENJELASAN
Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	400	Target ini ditetapkan dengan melihat capaian beberapa tahun sebelumnya, dimana capaian tahun 2023 sebesar 357, capaian tahun 2024 sebesar 357, maka target rata ditetapkan 400

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN
SEKRETARIAT DAERAH
TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : MURLINDA HERAWATY, A.Md

Jabatan : ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA

Selanjutnya disebut *Pihak Pertama*

Nama : SABERI, S.ST

Jabatan : KEPALA BAGIAN KESEJATERAAN RAKYAT

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut *Pihak Kedua*

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Tana Paser, 20 Oktober 2025

Pihak Kedua,	Pihak Pertama,
KEPALA BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT,	ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA
SABERI. S.ST	**MURLINDA HERAWATY, A.Md**
NIP. 19700523 199401 1 001	NIP. 19700412 199002 2 001

Lampiran 1 Perjanjian Kinerja

SEKRETARIAT DAERAH
PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN
TAHUN 2025

NO	SASARAN KINERJA SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Terlaksananya Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB	1. Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB	200 dokumen

NO	SUB KEGIATAN	ANGGARAN
1	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial	Rp. 32.766.531.597

Tana Paser, 20 Oktober 2025

Pihak Kedua,
KEPALA BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT,

SABERI. S.ST
NIP. 19700523 199401 1 001

Pihak Pertama,
ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA

MURLINDA HERAWATY, A.Md
NIP. 19700412 199002 2 001

Lampiran 2 Perjanjian Kinerja

SEKRETARIAT DAERAH
PENJELASAN KINERJA
TAHUN 2025

Penjelasan Kinerja 1

Uraian Sasaran/

Yang dimaksud dalam sasaran kinerja ini adalah kegiatan yang mempunyai tujuan Untuk meningkatkan kesejahteraan masyakat baik di bidang Pendidikan dan keagamaan yang tepat sasaran.

Indikator Kinerja

Sasaran kinerja ini memiliki 1 (satu) Indikator kinerja yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian /kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan, antara lain :

NO	URAIAN	RELEVANSI	FORMULASI	SUMBER DATA
1	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB	*Jumlah dokumen di bagi jumlah kegiatan*	Bagian Kesra

Target Kinerja

Dalam perjanjian kinerja ini, setiap indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut :

INDIKATOR KINERJA	TARGET	PENJELASAN
Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas	200	Target ini ditetapkan dengan melihat capaian beberapa tahun sebelumnya, dimana capaian tahun 2023 sebesar 357, capaian tahun 2024 sebesar 357, maka target rata ditetapkan 200

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN
SEKRETARIAT DAERAH
TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ADI MAULANA, S.Sos. M.Si

Jabatan : ASISTEN PEREKONOMI DAN PEMBANGUNAN

Selanjutnya disebut *Pihak Pertama*

Nama : Drs. KATSUL WIJAYA, M.Si

Jabatan : SEKRETARIS DAERAH

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut *Pihak Kedua*

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Tana Paser, 2 0 Oktober 2025

Pihak Kedua, SEKRETARIS DAERAH,	Pihak Pertama, ASISTEN PEREKONOMI DAN PEMBANGUNAN
Drs. KATSUL WIJAYA, M.Si	**ADI MAULANA, S.Sos. M.Si**
NIP 19661211 198609 1 002	NIP. 19690919 198902 1 001

Lampiran 1 Perjanjian Kinerja

SEKRETARIAT DAERAH
PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN
TAHUN 2025

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR SASARAN	TARGET
1	2	3	4
1	Terwujudnya Program Perekonomian dan Pembangunan	1 Persentase Kebijakan Perekonomian dan Pembangunan yang ditindaklanjuti	100 Persen

NO	PROGRAM	ANGGARAN
1	Program Perekonomian dan Pembangunan	Rp. 6.386.294.670

Tana Paser, 20 Oktober 2025

Pihak Kedua,
SEKRETARIS DAERAH,

Drs. KATSUL WIJAYA, M.Si
NIP 19661211 198609 1 002

Pihak Pertama,
ASISTEN PEREKONOMI DAN PEMBANGUNAN

ADI MAULANA, S.Sos. M.Si
NIP. 19690919 198902 1 001

Lampiran 2 Perjanjian Kinerja

SEKRETARIAT DAERAH
PENJELASAN KINERJA
TAHUN 2025

Penjelasan Kinerja 1

Uraian Sasaran/

Yang dimaksud dalam sasaran kinerja ini adalah Kinerja ini diarahkan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, menurunkan tingkat kemiskinan, menciptakan lapangan kerja, meningkatkan kualitas Pendidikan dan Kesehatan serta memperbaiki insfratuktur. Berikut adalan beberapa poin utama yang biasanya dievaluasi dalam kinerja Program Perekonomian dan Pembangunan; - Pertumbuhan Ekonomi, - Pengurangan Kemiskinan dan Ketimpangan, - Ketenagakerjaan dan Pengurangan Pembangunan, - Kualitas Pendidikan dan Kesehatan, - Pengembangan Insfrastruktur, - Stabilitas Makro ekonomi,-Keberlanjutan Lingkungan, - Efektivitas Implementasi Kebijakan, - Daya saing dan Inovasi

Indikator Kinerja

Sasaran kinerja ini memiliki 1 (satu) Indikator kinerja yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian /kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan, antara lain :

NO	URAIAN	RELEVANSI	FORMULASI	SUMBER DATA
1	Persentase Kebijakan Perekonomian dan Pembangunan yang ditindaklanjuti	Indikator Kinerja Persentase Kebijakan Perekonomian dan Pembangunan yang ditindaklanjuti menunjukkan seberapa bersar persentase dari total kebijakan yang telah dibuat yang benar benar diterapkan atau diimplementasikan. Indikator ini Relevan untuk mengukur efektivitas implementasi	Jumlah hasil rapat-rapat koordinasi/konsultasi bidang perekonomian dan pembangunan yang dirumuskan menjadi Usulan draf Perda/perbup/surat keputusan kepala daerah/instruksi kepala daerah/surat edaran kepala daerah dibagi Jumlah rapat-rapat koordinasi/konsultasi bidang perekonomian dan pembangunan di tindak lanjuti dikalikan	Rekapitulasi draf produk Perundangan daerah dari bagian Hukum

		kebijakan dalam sektosectoromi dan pembangunan serta untuk menilai dampak kebijakan terhadap pencapaian tujuan ekonomi dan pembangunan. Relevansi dari indicator ini meliputi ; Pengukuran efektivitas impelemtasi kebijakan, evaluasi kinerja pemerintah, Penilai dampak kebijakan, dan Pengelolaan Anggaran dan Sumber Daya	100%	

Target Kinerja

Dalam perjanjian kinerja ini, setiap indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut :

INDIKATOR KINERJA	TARGET	PENJELASAN
Persentase Kebijakan Perekonomian dan Pembangunan yang ditindaklanjuti	100 %	Target ini ditetapkan dengan melihat capaian beberapa tahun sebelumnya, dimana capaian tahun 2023 sebesar 100%, capaian tahun 2024 sebesar 100%, maka target rata ditetapkan 100 %

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN
SEKRETARIAT DAERAH
TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : NOR AINAWATI, SH, MM

Jabatan : KEPALA BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN

Selanjutnya disebut *Pihak Pertama*

Nama : ADI MAULANA, S.Sos. M.Si

Jabatan : ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut *Pihak Kedua*

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Tana Paser, 20 Oktober 2025

Pihak Kedua	Pihak Pertama,
ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	KEPALA BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN,
ADI MAULANA, S.Sos. M.Si	**NOR AINAWATI, SH. MM**
NIP. 19690919 198902 1 001	NIP. 19710808 200003 2 004

Lampiran 1 Perjanjian Kinerja

SEKRETARIAT DAERAH
PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN
TAHUN 2024

NO	SASARAN KINERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	1 Persentase SKPD tertib dalam Adminiatrasi Pembangunan	100 Persen

NO	KEGIATAN	ANGGARAN
1	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Rp. 993.461.644

Tana Paser, 20 Oktober 2025

Pihak Kedua	Pihak Pertama,
ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	KEPALA BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN,
ADI MAULANA, S.Sos. M.Si	**NOR AINAWATI, SH. MM**
NIP. 19690919 198902 1 001	NIP. 19710808 200003 2 004

Lampiran 2 Perjanjian Kinerja

SEKRETARIAT DAERAH
PENJELASAN KINERJA
TAHUN 2025

Penjelasan Kinerja 1

Uraian Sasaran/

Yang dimaksud dalam sasaran kinerja ini adalah proses untuk mengelola, mengawasi dan mengevaluasi semua kegiatan administrative yang terkait dengan pembangunan, seperti, Perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan. Tujuan utmananya adalah untuk memastikan bahwa semua program pembangunan berjalan sesuai dengan rencana, efisien dalam penggunaan sumber daya, dan mencapai sasaran yang ditetapkan.

Indikator Kinerja

Sasaran kinerja ini memiliki 1 (satu) Indikator kinerja yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian /kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan, antara lain :

NO	URAIAN	RELEVANSI	FORMULASI	SUMBER DATA
1	Persentase SKPD tertib dalam Adminiatrasi Pembangunan	Indicator Persentase SKPD tertib dalam Adminiatrasi Pembangunan indicator ini relevan jika untuk menilai seberapa banyak SKPD yang mematuhi prosedur administrasi terkait pelaksanaan proyek pembangunan. Relevansi indikator ini terlihat dalam upaya meningkatkan tata Kelola, akuntabilitas, dan efisiensi administrasi pembangunan di lingkup pemerintah	Jumlah SKPD yang tertib dibagi total SKPD kali 100	Bagian Adbang

Target Kinerja

Dalam perjanjian kinerja ini, setiap indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut :

INDIKATOR KINERJA	TARGET	PENJELASAN
Persentase SKPD tertib dalam Administrasi Pembangunan	100 %	Target ini ditetapkan dengan melihat capaian beberapa tahun sebelumnya, dimana capaian tahun 2023 sebesar 100%, capaian tahun 2024 sebesar 100%, maka target rata ditetapkan 100 %

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN
SEKRETARIAT DAERAH
TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : IRFAN YUWANI INDRAWAN, ST

Jabatan : ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA

Selanjutnya disebut *Pihak Pertama*

Nama : NOR AINAWATI, SH, MM

Jabatan : KEPALA BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut *Pihak Kedua*

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Tana Paser, 20 Oktober 2025

Pihak Kedua,	Pihak Pertama,
KEPALA BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN,	ANALIS KEBIJAKAN,AHLI MUDA
NOR AINAWATI, SH. MM	**IRFAN YUWANI INDRAWAN, ST**
NIP. 19710808 200003 2 004	NIP. 19760523 200312 1 003

Lampiran 1 Perjanjian Kinerja

SEKRETARIAT DAERAH
PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN
TAHUN 2025

NO	SASARAN KINERJA SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	1 Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah	2 Dok

NO	SUB KEGIATAN	ANGGARAN
1	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Rp. 311.438.830

Tana Paser, 20 Oktober 2025

Pihak Kedua,
KEPALA BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN,

NOR AINAWATI, SH. MM
NIP. 19710808 200003 2 004

Pihak Pertama,
ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA

IRFAN YUWANI INDRAWAN, ST
NIP. 19760523 200312 1 003

Lampiran 2 Perjanjian Kinerja

SEKRETARIAT DAERAH
PENJELASAN KINERJA
TAHUN 2025

Penjelasan Kinerja 1

Uraian Sasaran/

Yang dimaksud dalam sasaran kinerja ini adalah proses untuk menentukan usaha dan hasil yang dicapai dalam mendukung penyusunan program pembangunan disuatu daerah. Sub kegiatan ini biasanya melibatkan beberapa kegiatan pendukung diantaranya ; identifikasi kebutuhah, rapat dan koordinasi, penyusunan rencana, monitoring dan evaluasi

Indikator Kinerja

Sasaran kinerja ini memiliki 1 (satu) Indikator kinerja yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian /kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan, antara lain :

NO	URAIAN	RELEVANSI	FORMULASI	SUMBER DATA
1	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah	Indicator Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah indicator ini karena tujuan utamanya adalah memastikan bahwa proses fasilitasi berjalan dan menghasil kan output yang terukur	*Jumlah dokumen*	Bagian Adbang

Target Kinerja

Dalam perjanjian kinerja ini, setiap indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut :

INDIKATOR KINERJA	TARGET	PENJELASAN
Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah	2	Target ini ditetapkan dengan melihat capaian beberapa tahun sebelumnya, dimana capaian tahun 2023 sebesar 2, capaian tahun 2024 sebesar 2, maka target rata ditetapkan 2

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN
SEKRETARIAT DAERAH
TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : RONI PASLAH, ST

Jabatan : ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA

Selanjutnya disebut *Pihak Pertama*

Nama : NOR AINAWATI, SH, MM

Jabatan : KEPALA BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut *Pihak Kedua*

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Tana Paser, 20 Oktober 2025

Pihak Kedua, KEPALA BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN,	Pihak Pertama, ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA
NOR AINAWATI, SH. MM	**RONI PASLAH, ST**
NIP. 19710808 200003 2 004	NIP. 19801215 201001 1 018

Lampiran 1 Perjanjian Kinerja

SEKRETARIAT DAERAH
PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN
TAHUN 2025

NO	SASARAN KINERJA SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Terlaksananya Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	1 Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	12 Laporan

NO	SUB KEGIATAN	ANGGARAN
1	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Rp. 340.666.592

Tana Paser, 20 Oktober 2025

Pihak Kedua,
KEPALA BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN,

NOR AINAWATI, SH. MM
NIP. 19710808 200003 2 004

Pihak Pertama,
ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA

RONI PASLAH, ST
NIP. 19801215 201001 1 018

Lampiran 2 Perjanjian Kinerja

SEKRETARIAT DAERAH
PENJELASAN KINERJA
TAHUN 2025

Penjelasan Kinerja 1

Uraian Sasaran/

Yang dimaksud dalam sasaran kinerja ini adalah serangkaian aktifitas untuk memastikan bahwa program-program pembangunan berjalan sesuai dengan rencana, target dan anggaran yang telah ditetapkan. Pengendalian dalam hal ini bertujuan untuk memonitoring, mengawasi, dan melakukan Tindakan koreksi jika ditemukan penyimpangan atau hambatan dalam pelaksanaan program. Sedangkan evaluasi berfokus pada penilaian hasil dan dampak dari program yang telah dilaksanakan, baik secara kualitatif maupun kuantitatif. Evaluasi dilakukan untuk menilai efektivitas, efisiensi, relevansi dan berkelanjutan program serta untuk mengetahui apakah tujuan pembangunan terlah tercapai.

Indikator Kinerja

Sasaran kinerja ini memiliki 1 (satu) Indikator kinerja yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian /kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan, antara lain :

NO	URAIAN	RELEVANSI	FORMULASI	SUMBER DATA
1	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Indicator Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan memiliki relevansiyang baik apabila fokusnya adalah untuk memastikan adanya pelaporan dan dokumentasi dalam proses pengendalian dan evaluasi program pembangunan	*Jumlah laporan*	Bagian Adbang

Target Kinerja

Dalam perjanjian kinerja ini, setiap indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut :

INDIKATOR KINERJA	TARGET	PENJELASAN
Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	12	Target ini ditetapkan dengan melihat capaian beberapa tahun sebelumnya, dimana capaian tahun 2023 sebesar 12, capaian tahun 2024 sebesar 12, maka target rata ditetapkan 12

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN
SEKRETARIAT DAERAH
TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : SUJIANTO, SE

Jabatan : ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA

Selanjutnya disebut *Pihak Pertama*

Nama : NOR AINAWATI, SH, MM

Jabatan : KEPALA BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut *Pihak Kedua*

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Tana Paser, 20 Oktober 2025

Pihak Kedua,	Pihak Pertama,
KEPALA BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN,	ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA
NOR AINAWATI, SH. MM	**SUJIANTO, SE**
NIP. 19710808 200003 2 004	NIP. 19770708 200701 1 013

Lampiran 1 Perjanjian Kinerja

SEKRETARIAT DAERAH
PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN
TAHUN 2025

NO	SASARAN KINERJA SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Terlaksananya Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	1 Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	12 Laporan

NO	SUB KEGIATAN	ANGGARAN
1	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Rp. 341.356.222

Tana Paser, 20 Oktober 2025

Pihak Kedua,
KEPALA BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN,

NOR AINAWATI, SH. MM
NIP. 19710808 200003 2 004

Pihak Pertama,
ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA

SUJIANTO, SE
NIP. 19770708 200701 1 013

Lampiran 2 Perjanjian Kinerja

SEKRETARIAT DAERAH
PENJELASAN KINERJA
TAHUN 2025

Penjelasan Kinerja 1

Uraian Sasaran/

Yang dimaksud dalam sasaran kinerja ini adalah berfokus pada pemantauan, penilaian dan penyusunan laporan terkait pelaksanaan program pembangunan. Secara keseluruhan sub kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas dan kualitas pembangunan dengan memastikan bahwa setiap kegiatan yang dilakukan memiliki dampak positif serta sesuai dengan perencanaan..

Indikator Kinerja

Sasaran kinerja ini memiliki 1 (satu) Indikator kinerja yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian /kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan, antara lain :

NO	URAIAN	RELEVANSI	FORMULASI	SUMBER DATA
1	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Indicator Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan bisa dikatakan relevan namun harus memenuhi beberapa kriteria agar lebih bermakna dan efektif dalam evaluasi pembangunan antara lain; menunjukkan produktivitas, menunjukkan cakupan pemantauan dan evaluasi, dan kualitas laporan	*Jumlah laporan*	Bagian Adbang

Target Kinerja

Dalam perjanjian kinerja ini, setiap indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut :

INDIKATOR KINERJA	TARGET	PENJELASAN
Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	12	Target ini ditetapkan dengan melihat capaian beberapa tahun sebelumnya, dimana capaian tahun 2023 sebesar 12, capaian tahun 2024 sebesar 12, maka target rata ditetapkan 12

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN
SEKRETARIAT DAERAH
TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : PAULUS MARGITA, S.SOS, M.Si

Jabatan : KEPALA BAGIAN PEREKONOMIAN

Selanjutnya disebut *Pihak Pertama*

Nama : ADI MAULANA, S.Sos, M.Si

Jabatan : ASISTEN PEREKONOMI DAN PEMBANGUNAN

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut *Pihak Kedua*

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Tana Paser, 20 Oktober 2025

Pihak Kedua ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Pihak Pertama, KEPALA BAGIAN PEREKONOMIAN
ADI MAULANA, S.Sos, M.SI	**PAULUS MARGITA, S.SOS, MM**
NIP. 19690919 198902 1 001	NIP. 19690211 199002 1 002

Lampiran 1 Perjanjian Kinerja

SEKRETARIAT DAERAH
PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN
TAHUN 2025

NO	SASARAN KINERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	1 Persentase Koordinasi Kebijakan Pelaksanaan Bidang Ekonomi	100 Persen

NO	KEGIATAN	ANGGARAN
1	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Rp. 1.002.057.691

Tana Paser, 20 Oktober 2025

Pihak Kedua
ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN

ADI MAULANA, S.Sos, M.SI
NIP. 19690919 198902 1 001

Pihak Pertama,
KEPALA BAGIAN PEREKONOMIAN

PAULUS MARGITA, S.SOS, MM
NIP. 19690211 199002 1 002

Lampiran 2 Perjanjian Kinerja

SEKRETARIAT DAERAH
PENJELASAN KINERJA
TAHUN 2025

Penjelasan Kinerja 1

Uraian Sasaran/

Yang dimaksud dalam sasaran kinerja ini merujuk pada efektivitas dan efisiensi dari berbagai Tindakan dan program yang di lakukan pemerintah atau institusi terkait untuk mencapai tujuan ekonomiTujuan ini bisa meliputi pertumbuhan ekonomi, stabilitas harga, peningkatan kesempatan kerja, pemerataan pendapatan hingga peningkatan kesejahteraan masyarakat

Indikator Kinerja

Sasaran kinerja ini memiliki 1 (satu) Indikator kinerja yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian /kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan, antara lain :

NO	URAIAN	RELEVANSI	FORMULASI	SUMBER DATA
1	Persentase Koordinasi Kebijakan Pelaksanaan Bidang Ekonomi	Indicator Persentase Koordinasi Kebijakan Pelaksanaan Bidang Ekonomi bisa dikatan relevan karena berfokus untuk mengevaluasi seberapa efektif koordinasi antarinstansi atau departemen terkait dalam mengimplementasikan kebijakan ekonomi. Indikator ini umumnya digunakan untuk mengukur keterlibatan atau sinergi antar pemangku kepentingan dalam menjalankan kebijakan atau program di bidang ekonomi. Indikator ini perlu memperhitungkan kualitas koordinasi, bukan hanya kuantitas.	*Jumlah kegiatan koordinasi yang terlaksana di bagi jumlah rencana kegiatan koordinasi yang ditetapkan di kali 100*	Bagian perekonomian

Target Kinerja

Dalam perjanjian kinerja ini, setiap indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut :

INDIKATOR KINERJA	TARGET	PENJELASAN
Persentase Koordinasi Kebijakan Pelaksanaan Bidang Ekonomi	100 %	Target ini ditetapkan dengan melihat capaian beberapa tahun sebelumnya, dimana capaian tahun 2023 sebesar 100%, capaian tahun 2024 sebesar 100%, maka target rata ditetapkan 100 %

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN
SEKRETARIAT DAERAH
TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ROSDIANA PASARIBU, SE

Jabatan : ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA

Selanjutnya disebut *Pihak Pertama*

Nama : PAULUS MARGITA, S.SOS. MM

Jabatan : KEPALA BAGIAN PEREKONOMIAN

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut *Pihak Kedua*

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Tana Paser, 20 Oktober 2025

Pihak Kedua, KEPALA BAGIAN PEREKONOMIAN	Pihak Pertama, ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA
PAULUS MARGITA, S.SOS, MM	**ROSDIANA PASARIBU, SE**
NIP. 19690211 199002 1 002	NIP. 19790808 199803 2 001

Lampiran 1 Perjanjian Kinerja

SEKRETARIAT DAERAH
PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN
TAHUN 2025

NO	SASARAN KINERJA SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Terlaksananya Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	1 Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	32 dokumen

NO	SUB KEGIATAN	ANGGARAN
1	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	Rp. 302.171.031

Tana Paser, 20 Oktober 2025

Pihak Kedua,
KEPALA BAGIAN PEREKONOMIAN

PAULUS MARGITA, S.SOS, MM
NIP. 19690211 199002 1 002

Pihak Pertama,
ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA

ROSDIANA PASARIBU, SE
NIP. 19790808 199803 2 001

Lampiran 2 Perjanjian Kinerja

SEKRETARIAT DAERAH
PENJELASAN KINERJA
TAHUN 2025

Penjelasan Kinerja 1

Uraian Sasaran/

Yang dimaksud dalam sasaran kinerja ini adalah proses merencanakan dan mengawasi aktivitas bisnis kecil agar dapat berjalan efektif, efisien dan menguntungkan.

Indikator Kinerja

Sasaran kinerja ini memiliki 1 (satu) Indikator kinerja yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian /kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan, antara lain :

NO	URAIAN	RELEVANSI	FORMULASI	SUMBER DATA
1	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	Indicator Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil bisa dikatakan relevan karena indicator berfokus pada kuantitas dokumen yang dihasilkan, oleh karena itu agar indicator ini memiliki relevansi yang lebih tinggi, perlu dipastikan bahwa dokumen yang dihasilkan berkualitas, impelentasi dan berdampak langsung pada peningkatan kapasitas dan perkembangan ekonomi mikro kecil.	*Jumlah dokumen Perencanaan + Jumlah Dokumen Pengawasan*	Bagian perekonomian

Target Kinerja

Dalam perjanjian kinerja ini, setiap indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut :

INDIKATOR KINERJA	TARGET	PENJELASAN
Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	32	Target ini ditetapkan dengan melihat capaian beberapa tahun sebelumnya, dimana capaian tahun 2023 sebesar 20, capaian tahun 2024 sebesar 20, maka target rata ditetapkan 32

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN
SEKRETARIAT DAERAH
TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : NURMALA HAYATI ADAM, SE, M.SI

Jabatan : ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA

Selanjutnya disebut *Pihak Pertama*

Nama : PAULUS MARGITA, S.SOS, M.Si

Jabatan : KEPALA BAGIAN PEREKONOMIAN

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut *Pihak Kedua*

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Tana Paser, 2 0 Oktober 2025

Pihak Kedua,	Pihak Pertama,
KEPALA BAGIAN PEREKONOMIAN	ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA
PAULUS MARGITA, S.SOS, MM	**NURMALA HAYATI ADAM, SE, M.SI**
NIP. 19690211 199002 1 002	NIP. 19820313 200502 2 007

Lampiran 1 Perjanjian Kinerja

SEKRETARIAT DAERAH
PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN
TAHUN 2024

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	**2**	**3**	**4**
1	Terlaksananya Koordinasi, SinkronisasI dan Evaluasi Kebijakan Pembentukan BLUD	1 Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pembentukan BLUD	30 dokumen
2	Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	2 Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	24 dokumen

NO	SUB KEGIATAN	ANGGARAN
1	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Rp. 304.872.708
1	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pembentukan BLUD	Rp. 31.947.952

Tana Paser, 20 Oktober 2025

Pihak Kedua,
KEPALA BAGIAN PEREKONOMIAN

PAULUS MARGITA, S.SOS, MM
NIP. 19690211 199002 1 002

Pihak Pertama,
ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA

NURMALA HAYATI ADAM, SE, M.SI
NIP. 19820313 200502 2 007

Lampiran 2 Perjanjian Kinerja

SEKRETARIAT DAERAH
PENJELASAN KINERJA
TAHUN 2025

Penjelasan Kinerja 1

Uraian Sasaran/

Yang dimaksud dalam sasaran kinerja ini adalah proses mencakup Langkah-langkah dan upaya yang dilakukan untuk mendukung proses pembentukan Bdan Layanan Umum Daerah (BLUD) melalui tiga aspek yaitu ; koordinasi, Siknronisasi dan evaluasi. Secara keseluruhan, kinerja sub kegiatan ini bertujuan untuk mendukung terbentuknya BLUD yang professional dan mampu memberikan layanan berkualitas disektor-sektor tertentu secara mandiri namun tetap berpedoman pada regulasi yang berlaku

Indikator Kinerja

Sasaran kinerja ini memiliki 1 (satu) Indikator kinerja yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian /kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan, antara lain :

NO	URAIAN	RELEVANSI	FORMULASI	SUMBER DATA
1	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pembentukan BLUD	Indicator Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pembentukan BLUD indicator ini relevan jika dokumen hasil koordinasi atau evaluasi benar benar penting dalam proses pengambilan keputusan dan implementasi kebijakan BLUD. Indikator ini juga penting untuk mengetahui bahwa kebijakan telah melalui proses penyesuaian dan evaluasi yang terdokumentasi	*Jumlah dokumen final*	Bagian perekonomian

Target Kinerja

Dalam perjanjian kinerja ini, setiap indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut :

INDIKATOR KINERJA	TARGET	PENJELASAN
Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pembentukan BLUD	30	Target ini ditetapkan dengan melihat capaian beberapa tahun sebelumnya, dimana capaian tahun 2023 sebesar 25, capaian tahun 2024 sebesar 25, maka target rata ditetapkan 30

Lampiran 2 Perjanjian Kinerja

SEKRETARIAT DAERAH
PENJELASAN KINERJA
TAHUN 2025

Penjelasan Kinerja 2

Uraian Sasaran/

Yang dimaksud dalam sasaran kinerja ini adalah proses melibatkan serangkaian aktivitas yang dirancang untuk memastikan bahwa Badan Usaha Milik daerah (BUMD) dan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) dikelola secara efektif, efisien, dan sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah. Koordinasi bertujuan untuk menyelaraskan antara BUMD/BLUD dengan pemerintah, Monitoring bertujuan untuk memantau pelaksanaan Operasional BUMD dan BLUD sesuai dengan rencana kerja dan anggaran yang telah ditetapkan, Evluasi bertujuan menilai pencapaian kinerja BUMD dan BLUD berdasarkan indicator tertentus seperti Efisien, efektivitas, dan dampak layanan terhadap masyarakat.

Indikator Kinerja

Sasaran kinerja ini memiliki 1 (satu) Indikator kinerja yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian /kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan, antara lain :

NO	URAIAN	RELEVANSI	FORMULASI	SUMBER DATA
1	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Indicator Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD sangat relevan dalam konteks evaluasi kegiatan administrasi dan koordinasi. Namun indicator ini umumnya hanya mengukur output bukan kualitas kebiijakan yang dihasilkan.	*Jumlah dokumen final*	Bagian perekonomian

Target Kinerja

Dalam perjanjian kinerja ini, setiap indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut :

INDIKATOR KINERJA	TARGET	PENJELASAN
Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	24	Target ini ditetapkan dengan melihat capaian beberapa tahun sebelumnya, dimana capaian tahun 2023 sebesar 20, capaian tahun 2024 sebesar 20, maka target rata ditetapkan 24

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN
SEKRETARIAT DAERAH
TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : TITI KUSTANIAH, S.Sos. MM

Jabatan : ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA

Selanjutnya disebut *Pihak Pertama*

Nama : PAULUS MARGITA, S.SOS, M.Si

Jabatan : KEPALA BAGIAN PEREKONOMIAN

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut *Pihak Kedua*

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Tana Paser, 20 Oktober 2025

Pihak Kedua,	Pihak Pertama,
KEPALA BAGIAN PEREKONOMIAN	ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA
PAULUS MARGITA, S.SOS, MM	**TITI KUSTANIAH, S.Sos.MM**
NIP. 19690211 199002 1 002	NIP. 19760816 200604 2 025

Lampiran 1 Perjanjian Kinerja

SEKRETARIAT DAERAH
PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN
TAHUN 2025

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	**2**	**3**	**4**
1	Terlaksananya Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	1 Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	48 dokumen

NO	SUB KEGIATAN	ANGGARAN
1	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Rp. 363.066.000

Tana Paser, 20 Oktober 2025

Pihak Kedua,
KEPALA BAGIAN PEREKONOMIAN

PAULUS MARGITA, S.SOS, MM
NIP. 19690211 199002 1 002

Pihak Pertama,
ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA

TITI KUSTANIAH, S.Sos.MM
NIP. 19760816 200604 2 025

Lampiran 2 Perjanjian Kinerja

SEKRETARIAT DAERAH
PENJELASAN KINERJA
TAHUN 2025

Penjelasan Kinerja 1

Uraian Sasaran/

Yang dimaksud dalam sasaran kinerja ini adalah proses perekonomian mencakup pada efektivitas dan efisiensi dalam mengelola aliran barang, jasa dan sumber daya ekonomi di suatu wilayah. Fokus utama kegiatan ini adalah untuk memastikan distribusi yang tepat dan pengendalian terhadap berbagai aspek perekonomian agar dapat mendukung pertumbuhan ekonomi.

Indikator Kinerja

Sasaran kinerja ini memiliki 1 (satu) Indikator kinerja yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian /kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan, antara lain :

NO	URAIAN	RELEVANSI	FORMULASI	SUMBER DATA
1	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Indicator Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian sangat relevan karena disusun dengan jelas dan didukung formulasi yang baik.	*Jumlah dokumen final*	Bagian perekonomian

Target Kinerja

Dalam perjanjian kinerja ini, setiap indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut :

INDIKATOR KINERJA	TARGET	PENJELASAN
Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	48	Target ini ditetapkan dengan melihat capaian beberapa tahun sebelumnya, dimana capaian tahun 2023 sebesar 42, capaian tahun 2024 sebesar 42, maka target rata ditetapkan 48

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN
SEKRETARIAT DAERAH
TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : KHOZINATUL ASROR, S.Sos. M.Si

Jabatan : KEPALA BAGIAN SUMBER DAYA ALAM

Selanjutnya disebut *Pihak Pertama*

Nama : ADI MAULANA, S.Sos. M.Si

Jabatan : ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut *Pihak Kedua*

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Tana Paser, 20 Oktober 2025

Pihak Kedua,	Pihak Pertama,
ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	KEPALA BAGIAN SUMBER DAYA ALAM
ADI MAULANA, S.Sos. M.Si	**KHOZINATUL ASROR, S.Sos. M.Si**
NIP. 19690919 198902 1 001	NIP. 19720327 199803 1 007

Lampiran 1 Perjanjian Kinerja

SEKRETARIAT DAERAH
PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN
TAHUN 2025

NO	SASARAN KINERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	1 Persentase Koordinasi Kebijakan Sumber Daya Alam	100 Persen

NO	KEGIATAN	ANGGARAN
1	Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	Rp. 1.391.747.727

Tana Paser, 20 Oktober 2025

Pihak Kedua,
ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN

ADI MAULANA, S.Sos. M.Si
NIP. 19690919 198902 1 001

Pihak Pertama,
KEPALA BAGIAN SUMBER DAYA ALAM

KHOZINATUL ASROR, S.Sos. M.Si
NIP. 19720327 199803 1 007

Lampiran 2 Perjanjian Kinerja

SEKRETARIAT DAERAH
PENJELASAN KINERJA
TAHUN 2025

Penjelasan Kinerja 1

Uraian Sasaran/

Yang dimaksud dalam sasaran kinerja ini adalah bertujuan untuk memantau proses evaluasi dan penilaian atas implementasi kebijakan yang terkait dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam. Pemantauan ini bertujuan untuk memastikan bahwa kebijakan yang diterapkan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan yaitu mengelola sumber daya alam secara berkelanjutan dan adil.

Indikator Kinerja

Sasaran kinerja ini memiliki 1 (satu) Indikator kinerja yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian /kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan, antara lain :

NO	URAIAN	RELEVANSI	FORMULASI	SUMBER DATA
1	Persentase Koordinasi Kebijakan Sumber Daya Alam	Indicator Persentase Koordinasi Kebijakan Sumber Daya Alam dikatakan relevan karena bertujuan untuk mengukur sejauh mana koordinasi anatr lembaga atau pihak terkait dalam pengelolaan sumber daya alam sudah berjalan efektif. Indikator ini relevan untuk memastikan bahwa kebijakan yang dibuat saling mendukung untuk mengurangi konflik antar kebijakan dan mendorong efisiensi dalam menafaatkan sumber daya alam.	*Jumlah kegiatan yang terkoordinasi di bagi jumlah kebijakan yang harus dikoordinasikan koordinasi yang ditetapkan di kali 100*	Bagian SDA

Target Kinerja

Dalam perjanjian kinerja ini, setiap indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut :

INDIKATOR KINERJA	TARGET	PENJELASAN
Persentase Koordinasi Kebijakan Sumber Daya Alam	100 %	Target ini ditetapkan dengan melihat capaian beberapa tahun sebelumnya, dimana capaian tahun 2023 sebesar 100%, capaian tahun 2024 sebesar 100%, maka target rata ditetapkan 100 %

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN
SEKRETARIAT DAERAH
TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : NANI WIWIE CHANDAYANI, S.Pi

Jabatan : ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA

Selanjutnya disebut *Pihak Pertama*

Nama : KHOZINATUL ASROR, S.Sos. M.Si

Jabatan : KEPALA BAGIAN SUMBER DAYA ALAM

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut *Pihak Kedua*

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Tana Paser, 20 Oktober 2025

Pihak Kedua,	Pihak Pertama,
KEPALA BAGIAN SUMBER DAYA ALAM	ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA
KHOZINATUL ASROR, S.Sos. M.Si	**NANI WIWIE CHANDAYANI, S.Pi**
NIP. 19720327 199803 1 007	NIP. 19751126 200212 2 006

Lampiran 1 Perjanjian Kinerja

SEKRETARIAT DAERAH
PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN
TAHUN 2024

NO	SASARAN KINERJA SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan	1 Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan	45 Dokumen

NO	SUB KEGIATAN	ANGGARAN
1	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	Rp. 722.793.790

Tana Paser, Oktober 2025

Pihak Kedua,
KEPALA BAGIAN SUMBER DAYA ALAM

KHOZINATUL ASROR, S.Sos. M.Si
NIP. 19720327 199803 1 007

Pihak Pertama,
ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA

NANI WIWIE CHANDAYANI, S.Pi
NIP. 19751126 200212 2 006

Lampiran 2 Perjanjian Kinerja

SEKRETARIAT DAERAH
PENJELASAN KINERJA
TAHUN 2025

Penjelasan Kinerja 1

Uraian Sasaran/

Yang dimaksud dalam sasaran kinerja ini adalah bertujuan untuk memastikan bahwa kebijakan disektor pertanian, kehutanan, dan perikanan berjalan dengan baik, selaras, dan sesuai dengan kebutuhan serta perkembangan

Indikator Kinerja

Sasaran kinerja ini memiliki 1 (satu) Indikator kinerja yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian /kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan, antara lain :

NO	URAIAN	RELEVANSI	FORMULASI	SUMBER DATA
1	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan	Indicator Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan relevan karena jumlah dokumen dapat menunjukkan upaya koordinasi dan sinkronisasi, tetapi tidak selalu mencerminkan efektivitas atau kualitas dari kebijakan yang dihasilkan	*Jumlah dokumen yang dihasilkan*	Bagian SDA

Target Kinerja

Dalam perjanjian kinerja ini, setiap indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut :

INDIKATOR KINERJA	TARGET	PENJELASAN
Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan	45	Target ini ditetapkan dengan melihat capaian beberapa tahun sebelumnya, dimana capaian tahun 2023 sebesar 30, capaian tahun 2024 sebesar 30, maka target rata ditetapkan 45

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN
SEKRETARIAT DAERAH
TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : DESI WARDAYANI, S.HUT, M.SI

Jabatan : ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA

Selanjutnya disebut *Pihak Pertama*

Nama : KHOZINATUL ASROR, S.Sos. M.Si

Jabatan : KEPALA BAGIAN SUMBER DAYA ALAM

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut *Pihak Kedua*

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Tana Paser, 20 Oktober 2025

Pihak Kedua,	Pihak Pertama,
KEPALA BAGIAN SUMBER DAYA ALAM	ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA
KHOZINATUL ASROR, S.Sos. M.Si	**DESI WARDAYANI, S.HUT. M.SI**
NIP. 19720327 199803 1 007	NIP. 19821230 200502 2 001

Lampiran 1 Perjanjian Kinerja

SEKRETARIAT DAERAH
PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN
TAHUN 2025

NO	SASARAN KINERJA SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertambangan dan Sumber Daya Mineral, Lingkungan Hidup	1 Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertambangan dan Sumber Daya Mineral, Lingkungan Hidup	37 Dokumen

NO	SUN KEGIATAN	ANGGARAN
1	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	Rp. 275.262.000

Tana Paser, 20 Oktober 2025

Pihak Kedua,
KEPALA BAGIAN SUMBER DAYA ALAM

KHOZINATUL ASROR, S.Sos. M.Si
NIP. 19720327 199803 1 007

Pihak Pertama,
ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA

DESI WARDAYANI, S.HUT. M.SI
NIP. 19821230 200502 2 001

Lampiran 2 Perjanjian Kinerja

SEKRETARIAT DAERAH
PENJELASAN KINERJA
TAHUN 2025

Penjelasan Kinerja 1

Uraian Sasaran/

Yang dimaksud dalam sasaran kinerja ini adalah bertujuan untuk memastikan bahwa kebijakan disektor pertambangan dan lingkungan hidup dapat berjalan secara efektif dan sesuai dengan tujuan pembangunan berkelanjutan

Indikator Kinerja

Sasaran kinerja ini memiliki 1 (satu) Indikator kinerja yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian /kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan, antara lain :

NO	URAIAN	RELEVANSI	FORMULASI	SUMBER DATA
1	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertambangan dan Sumber Daya Mineral, Lingkungan Hidup	Indicator Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertambangan dan Sumber Daya Mineral, Lingkungan Hidup ini sangat relevan karena memiliki tujuan yang jelas	*Jumlah dokumen yang dihasilkan*	Bagian SDA

Target Kinerja

Dalam perjanjian kinerja ini, setiap indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut :

INDIKATOR KINERJA	TARGET	PENJELASAN
Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertambangan dan Sumber Daya Mineral, Lingkungan Hidup	37	Target ini ditetapkan dengan melihat capaian beberapa tahun sebelumnya, dimana capaian tahun 2023 sebesar 25, capaian tahun 2024 sebesar 25, maka target rata ditetapkan 37

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN
SEKRETARIAT DAERAH
TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : IR. MARDIANA, ST, MM

Jabatan : ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA

Selanjutnya disebut *Pihak Pertama*

Nama : KHOZINATUL ASROR, S.Sos. M.Si

Jabatan : KEPALA BAGIAN SUMBER DAYA ALAM

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut *Pihak Kedua*

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Tana Paser, 20 Oktober 2025

Pihak Kedua,	Pihak Pertama,
KEPALA BAGIAN SUMBER DAYA ALAM	ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA
KHOZINATUL ASROR, S.Sos. M.Si	**IR. MARDIANA, ST, MM**
NIP. 19720327 199803 1 007	NIP. 19770423 200502 2 002

Lampiran 1 Perjanjian Kinerja

SEKRETARIAT DAERAH
PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN
TAHUN 2025

NO	SASARAN KINERJA SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air	1 Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air	40 Dokumen

NO	SUB KEGIATAN	ANGGARAN
1	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	Rp. 393.691.937

Tana Paser, 20 Oktober 2025

Pihak Kedua,
KEPALA BAGIAN SUMBER DAYA ALAM

KHOZINATUL ASROR, S.Sos. M.Si
NIP. 19720327 199803 1 007

Pihak Pertama,
ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA

IR. MARDIANA, ST, MM
NIP. 19770423 200502 2 002

Lampiran 2 Perjanjian Kinerja

SEKRETARIAT DAERAH
PENJELASAN KINERJA
TAHUN 2025

Penjelasan Kinerja 1

Uraian Sasaran/

Yang dimaksud dalam sasaran kinerja ini adalah bertujuan untuk memastikan bahwa yang diterapkan dalam bidang energi dan air berjalan efektif, sesuai dan mencapai tujuan yang ditetapkan

Indikator Kinerja

Sasaran kinerja ini memiliki 1 (satu) Indikator kinerja yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian /kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan, antara lain :

NO	URAIAN	RELEVANSI	FORMULASI	SUMBER DATA
1	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air	Indicator Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air bisa di anggara relevan juka digunakan untuk mengukur output dari kegiatan administrasi yang berfokus pada penyusunan kebijakan	*Jumlah dokumen yang dihasilkan*	Bagian SDA

Target Kinerja

Dalam perjanjian kinerja ini, setiap indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut :

INDIKATOR KINERJA	TARGET	PENJELASAN
Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air	40	Target ini ditetapkan dengan melihat capaian beberapa tahun sebelumnya, dimana capaian tahun 2023 sebesar 30, capaian tahun 2024 sebesar 30, maka target rata ditetapkan 40

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN
SEKRETARIAT DAERAH
TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : SALMAN, SE, M.Si

Jabatan : KEPALA BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA

Selanjutnya disebut *Pihak Pertama*

Nama : ADI MAULANA, S.Sos, M.Si

Jabatan : ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut *Pihak Kedua*

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Tana Paser, 20 Oktober 2025

Pihak Kedua	Pihak Pertama
ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	KEPALA BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA
ADI MAULANA, S.Sos, M.Si	**SALMAN, SE, M.Si**
NIP. 19690919 198902 1 001	NIP. 19680206 199003 1 006

Lampiran 1 Perjanjian Kinerja

SEKRETARIAT DAERAH
PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN
TAHUN 2025

NO	SASARAN KINERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	1 Persentase Hasil Proses PBJ	100 persen

NO	KEGIATAN	ANGGARAN
1	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Rp. 3.030.976.560
	a. Terlaksananya Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	

Tana Paser, 20 Oktober 2025

Pihak Kedua	Pihak Pertama
ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	KEPALA BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA
ADI MAULANA, S.Sos, M.Si	**SALMAN, SE, M.Si**
NIP. 19690919 198902 1 001	NIP. 19680206 199003 1 006

SEKRETARIAT DAERAH
PENJELASAN KINERJA
TAHUN 2025

Penjelasan Kinerja 1

Uraian Sasaran/

Yang dimaksud dalam sasaran kinerja ini adalah pada bagian pengadaan pengadaan barang dan jasa bertujuan untuk mengelola proses pengadaan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan proses pengadaan barang dan jasa disuatu organisasi atau Lembaga. Pengelolaan ini mencakup beberapa hal seperti perencanaan, pemilihan penyedia/lelang, dengan tujuan untuk memastikan bahwa pengadaan dilakukan sesuai dengan prosedur yang berlaku.

Indikator Kinerja

Sasaran kinerja ini memiliki 1 (satu) Indikator kinerja yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian /kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan, antara lain :

NO	URAIAN	RELEVANSI	FORMULASI	SUMBER DATA
1	Persentase Hasil Proses PBJ	Indikator Persentase Hasil Proses PBJ bisa dikatakan relevan untuk mengukur sejauh mana capaian proses pengadaan barang dan jasa apakah sudah sesuai. Indicator ini bisa memberikan gambaran mengenai efisiensi dan efektifitas dalam hal waktu	*Jumlah PBJ yang selesai tepat waktu dibagi total PBJ yang direncanakan di kali 100*	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa

Target Kinerja

Dalam perjanjian kinerja ini, setiap indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut :

INDIKATOR KINERJA	TARGET	PENJELASAN
Persentase Hasil Proses PBJ	100 %	Target ini ditetapkan dengan melihat capaian beberapa tahun sebelumnya, dimana capaian tahun 2023 sebesar 100%, capaian tahun 2024 sebesar 100%, maka target rata ditetapkan 100 %

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN
SEKRETARIAT DAERAH
TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : JUMMY PENNY SAPUTRA, ST

Jabatan : PENGELOLAAN PENGADAAN BARANG DAN JASA AHLI MUDA

Selanjutnya disebut *Pihak Pertama*

Nama : SALMAN, SE, M.Si

Jabatan : KEPALA BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut *Pihak Kedua*

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Tana Paser, 20 Oktober 2025

Pihak Kedua	Pihak Pertama,
KEPALA BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA	PENGELOLAAN PENGADAAN BARANG DAN JASA AHLI MUDA
SALMAN, SE, M.Si	**JUMMY PENNY SAPUTRA, ST**
NIP. 19680206 199003 1 006	NIP. 19750714 200604 1 002

Lampiran 1 Perjanjian Kinerja

SEKRETARIAT DAERAH
PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN
TAHUN 2025

NO	SASARAN KINERJA SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Terkelolanya Layanan Pengadaan Secara Elektronik	1 Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Dokumen

NO	SUB KEGIATAN	ANGGARAN
1	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Rp. 1.225.578.397

Tana Paser, 20 Oktober 2025

Pihak Kedua
KEPALA BAGIAN PENGADAAN
BARANG DAN JASA

SALMAN, SE, M.Si
NIP. 19680206 199003 1 006

Pihak Pertama,
PENGELOLAAN PENGADAAN
BARANG DAN JASA AHLI MUDA

JUMMY PENNY SAPUTRA, ST
NIP. 19750714 200604 1 002

Lampiran 2 Perjanjian Kinerja

SEKRETARIAT DAERAH
PENJELASAN KINERJA
TAHUN 2025

Penjelasan Kinerja 1

Uraian Sasaran/

Yang dimaksud dalam sasaran kinerja ini adalah bertujuan untuk mendukung proses pengadaan barang dan jasa pemerintah secara efisien, transparan dan akuntabel. Pengelolaan ini mencakup Perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi yang baikan dengan system layanan pengadaan elaktronik. Pengelolaan LPSE sangat membantu dalam proses pengedaan di pemerintahan..

Indikator Kinerja

Sasaran kinerja ini memiliki 1 (satu) Indikator kinerja yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian /kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan, antara lain :

NO	URAIAN	RELEVANSI	FORMULASI	SUMBER DATA
1	Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Indicator Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik dikatakan relevan karena indicator tersebut memang menggambarkan kinerja LPSE dalam mendukung proses pengadaan. Indicator ini biasanya digunakan untuk mengukur jumlah dokumen dihasilkan melalui system pengadaan elektronik	*Jumlah dokumen tender* + *dokumen kontrak* + *dokumen administrasi*	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa

Target Kinerja

Dalam perjanjian kinerja ini, setiap indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut :

INDIKATOR KINERJA=	TARGET	PENJELASAN
Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik	100 %	Target ini ditetapkan dengan melihat capaian beberapa tahun sebelumnya, dimana capaian tahun 2023 sebesar 100%, capaian tahun 2024 sebesar 100%, maka target rata ditetapkan 100 %

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN
SEKRETARIAT DAERAH
TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : MUHAMMAD CHANDRA, SE

Jabatan : KASUBBAG PENGELOLAAN BARANG DAN JASA

Selanjutnya disebut *Pihak Pertama*

Nama : SALMAN, SE, M.Si

Jabatan : KEPALA BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut *Pihak Kedua*

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervise yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Tana Paser, 20 Oktober 2025

Pihak Kedua	Pihak Pertama,
KEPALA BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA	KASUBBAG PENGELOLAAN BARANG DAN JASA
SALMAN, SE, M.Si	**MUHAMMAD CHANDRA, SE**
NIP. 19680206 199003 1 0065	NIP. 19820606 201001 1 009

Lampiran 1 Perjanjian Kinerja

SEKRETARIAT DAERAH
PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2025

NO	SASARAN KINERJA SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Terkelolanya Pengadaan Barang dan Jasa	1 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Dokumen

NO	SUB KEGIATAN	ANGGARAN
	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Rp. 888.432.648

Tana Paser, 20 Oktober 2025

Pihak Kedua	Pihak Pertama,
KEPALA BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA	KASUBBAG PENGELOLAAN BARANG DAN JASA
SALMAN, SE, M.Si	**MUHAMMAD CHANDRA, SE**
NIP. 19680206 199003 1 0065	NIP. 19820606 201001 1 009

SEKRETARIAT DAERAH
PENJELASAN KINERJA
TAHUN 2025

Penjelasan Kinerja 1

Uraian Sasaran/

Yang dimaksud dalam sasaran kinerja ini adalah bertujuan melaksanakan proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi dalam pengadaan barang dan jasa sesuai kebutuhan pemerintah.

Indikator Kinerja

Sasaran kinerja ini memiliki 1 (satu) Indikator kinerja yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian /kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan, antara lain :

NO	URAIAN	RELEVANSI	FORMULASI	SUMBER DATA
1	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Indicator Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa dikatakan relevan dengan hasil jumlah dokumen kontrak dalam pengelolaan pengadaan barang dan jasa	*Jumlah dokumen dibuat bago total pengadaan*	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa

Target Kinerja

Dalam perjanjian kinerja ini, setiap indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut :

INDIKATOR KINERJA	TARGET	PENJELASAN
Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	2200	Target ini ditetapkan dengan melihat capaian beberapa tahun sebelumnya, dimana capaian tahun 2023 sebesar 1688, capaian tahun 2024 sebesar 1705, maka target rata ditetapkan 2200

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN
SEKRETARIAT DAERAH
TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : NUR ASNI, SE, MM

Jabatan : PLT. ASISTEN ADMINISTRASI UMUM

Selanjutnya disebut *Pihak Pertama*

Nama : Drs. KATSUL WIJAYA, M.Si

Jabatan : SEKRETARIS DAERAH

Selanjutnya disebut *Pihak Kedua*

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Tana Paser, 2 0 Oktober 2025

Pihak Pertama SEKRETARIS DAERAH	Pihak Pertama PLT. ASISTEN ADMINISRASI UMUM
Drs. KATSUL WIJAYA, M.SI	**NUR ASNI, SE, MM**
NIP. 19661211 198609 1 002	NIP. 19721215 199803 2 008

Lampiran 1 Perjanjian Kinerja

SEKRETARIAT DAERAH
TABEL KINERJA PERUBAHAN
TAHUN 2025
ASISTEN ADMINISTRASI UMUM

NO	SASARAN KINERJA PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Meningkatnya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Indek Kepuasan Layanan Sekretariat.	100

NO	PROGRAM	ANGGARAN	KET
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan daerah Kabupaten/Kota	Rp. 138.520.273.902	

Tana Paser, 20 Oktober 2025

Pihak Pertama
SEKRETARIS DAERAH

Drs. KATSUL WIJAYA, M.SI
NIP. 19661211 198609 1 002

Pihak Pertama
PLT. ASISTEN ADMINISRASI UMUM

NUR ASNI, SE, MM
NIP. 19721215 199803 2 008

Lampiran 2 Perjanjian Kinerja

SEKRETARIAT DAERAH
PENJELASAN KINERJA
TAHUN 2025

Penjelasan Kinerja 1

Uraian Sasaran/

Yang dimaksud dalam sasaran kinerja ini adalah untuk meningkatkan kapasitas dan efektivitas pemerintahan daerah dalam menjalankan tugas-tugas pokoknya. Kinerja ini bertujuan untuk membantu pemerintah dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang telah di delegasikan kepada mereka termasuk pelayanan publik

Indikator Kinerja

Sasaran kinerja ini memiliki 1 (satu) Indikator kinerja yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian /kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan, antara lain :

NO	URAIAN	RELEVANSI	FORMULASI	SUMBER DATA
1	Indek Kepuasan Layanan Sekretariat.	Indikator kinerja Indek Kepuasan Layanan Sekretariat sangat relevan untuk mengukur efektivitas dan kualitas layanan yang diberikan oleh sekretariat kepada pemangku kepentingan dan Pegawai Sekretariat Daerah, dan indicator ini mencakup beberapa aspek berikut; - kecepatan layanan, -Akurasi informas, - Kepedulian dan Sikap Pelayanan, - Ketersediaan dan kelengkapan fasilitas, - Kemudahan Prosedur, - dan tingkat kepuasan seluruh ASN Sekretariat Daerah.	Hasil Survei Kepuasan atas layanan	Survey Mandiri

Target Kinerja

Dalam perjanjian kinerja ini, setiap indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut :

INDIKATOR KINERJA	TARGET	PENJELASAN
Indek Kepuasan Layanan Sekretariat.	74	Target ini ditetapkan dengan melihat capaian beberapa tahun sebelumnya , dimana capaian tahun 2023 sebesar 72, capaian tahun 2024 sebesar 74, maka target rata ditetapkan 80

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN
SEKRETARIAT DAERAH
TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : M. ARIEF MEYDIASTONO, S.Sos

Jabatan : KEPALA BAGIAN ORGANISASI

Selanjutnya disebut *Pihak Pertama*

Nama : Plt. ASISTEN ADMINISTRASI UMUM

Jabatan : NUR ASNI, SE. MM

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut *Pihak Kedua*

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Tana Paser, 2 0 Oktober 2025

Pihak Kedua, Plt. ASISTEN ADMINISTRASI UMUM	Pihak Pertama, KEPALA BAGIAN ORGANISASI
NUR ASNI, SE, MM	**M. ARIEF MEYDIASTONO, S.Sos**
NIP. 19721215 199803 2 008	NIP. 19680519 198703 1 001

Lampiran 1 Perjanjian Kinerja

SEKRETARIAT DAERAH

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN

TAHUN 2025

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Penataan Organisasi	Persentase Perangkat Daerah yang tertata dengan baik	100 persen

NO	KEGIATAN	ANGGARAN	KET
1	Penataan Organisasi	1.555.961.240	

Tana Paser, 20 Oktober 2025

Pihak Pertama	Pihak Pertama,
Plt. ASISTEN ADMINISTRASI UMUM	KEPALA BAGIAN ORGANISASI
NUR ASNI, SE, MM	**M. ARIEF MEYDIASTONO,S.Sos**
NIP. 19721215 199803 2 008	NIP. 19680519 198703 1 001

SEKRETARIAT DAERAH
PENJELASAN KINERJA
TAHUN 2025

Penjelasan Kinerja 1

Uraian Sasaran/

Yang dimaksud dalam sasaran kinerja ini mengacu pada proses perbaikan, penyusunan ulang, atau pengaturan ulang struktur organisasi agar lebih efektif, efisien dan mampu mencapai tujuan organisasi dengan optimal. Penataan ini melibatkan berbagai aspek seperti penyesuaian fungsi, tugas dan wewenang tiap bagian dalam organisasi, serta penyelarasan strategi dan sumber daya manusia untuk mendukung visi dan misi organisasi.

Indikator Kinerja

Sasaran kinerja ini memiliki 1 (satu) Indikator kinerja yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian /kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan, antara lain :

NO	URAIAN	RELEVANSI	FORMULASI	SUMBER DATA
1	Persentase Perangkat Daerah yang tertata dengan baik	Indicator Persentase Perangkat Daerah yang tertata dengan baik dapat relevan karena tujuannya adalah untuk menilai efektivitas dan efisiensi tata Kelola perangkat daerah, dalam suatu organisasi pemerintahan. Penataan yang baik dapat mencakup berbagai aspek. Indikator ini dapat memberikan gambaran seberapa baik organisasi	*Jumlah perangkat daerah yang tertata dengan baik di bagi total perangkat daerah dikali 100*	Bagian organisasi

		lingkungan kerja yang teratur dan produktif.		

Target Kinerja

Dalam perjanjian kinerja ini, setiap indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut :

INDIKATOR KINERJA	TARGET	PENJELASAN
Persentase Perangkat Daerah yang tertata dengan baik	100	Target ini ditetapkan dengan melihat capaian beberapa tahun sebelumnya, dimana capaian tahun 2023 sebesar 100, capaian tahun 2024 sebesar 100, maka target rata ditetapkan 100

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN
SEKRETARIAT DAERAH
TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : BUDI PRASETYO, S.Pd. M.Pd

Jabatan : ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA

Selanjutnya disebut *Pihak Pertama*

Nama : M. ARIEF MAEDIASTONO, S.Sos

Jabatan : KEPALA BAGIAN ORGANISASI

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut *Pihak Kedua*

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Tana Paser, 20 Oktober 2025

Pihak Kedua,	Pihak Pertama,
KEPALA BAGIAN ORGANISASI	ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA
M. ARIEF MEYDIASTONO, S.Sos	**BUDI PRASETYO, S.Pd. M.Pd**
NIP. 19680519 198703 1 001	NIP. 19710715 199412 1 001

Lampiran 1 Perjanjian Kinerja

SEKRETARIAT DAERAH
TABEL KINERJA PERUBAHAN
TAHUN 2025

NO	SASARAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Terlaksananya Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	1 Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	12 dokumen

NO	SUB KEGIATAN		ANGGARAN
1	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Rp	696.111.541

Tana Paser, 20 Oktober 2025

Pihak Kedua,
KEPALA BAGIAN ORGANISASI

M. ARIEF MEYDIASTONO, S.Sos
NIP. 19680519 198703 1 001

Pihak Pertama,
ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA

BUDI PRASETYO, S.Pd. M.Pd
NIP. 19710715 199412 1 001

Lampiran 2 Perjanjian Kinerja

SEKRETARIAT DAERAH
PENJELASAN KINERJA
TAHUN 2025

Penjelasan Kinerja 1

Uraian Sasaran/

Yang dimaksud dalam sasaran kinerja ini adalah dua aspek penting dalam manajemen sumber daya manusia yang berfokus pada efektivitas struktur organisasi, kinerja pengelolaan kelembagaan adalah penilaian terhadap efektivitas, efisiensi dan produktifitas suatu Lembaga atau organisasi yang bertujuan untuk menciptakan organisasi yang solid dan berdaya saing dengan alur kerja yang optimal serta budaya kerja yang baik. Analisis jabatan adalah proses mengidentifikasi dan memahami tugas, tanggung jawab dan kompetensi yang diperlukan untuk setiap jabatan dalam organisasi.tujuannya adalah memastikan bahwa setiap posisi diisi oleh orang yang memiliki keterampilan dan kualitas yang sesuai..

Indikator Kinerja

Sasaran kinerja ini memiliki 1 (satu) Indikator kinerja yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian /kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan, antara lain :

NO	URAIAN	RELEVANSI	FORMULASI	SUMBER DATA
1	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Indicator Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan bisa dikatan relevan jika tujuannya untuk mengukur sejauh mana organisasi atau Lembaga telah memenuhi standar manajemen sumber daya manusia dan pengelolaan kelambagaan yang diperlukan. Dalam hal	*Jumlah dokumen yang disusun*	Bagian organisasi

		ini indicator tersebut bisa memberikan gambaran tentang kesesuaian antara kebutuhan dan pelaksanaan dokumen pengelolaan serta peranannya. Namun indicator ini kurang relevan apabila hanya berfokus pada kualitas tanpa melihat kuantitas.		

Target Kinerja

Dalam perjanjian kinerja ini, setiap indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut :

INDIKATOR KINERJA	TARGET	PENJELASAN
Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	21	Target ini ditetapkan dengan melihat capaian beberapa tahun sebelumnya, dimana capaian tahun 2023 sebesar 41, capaian tahun 2024 sebesar 41, maka target rata ditetapkan 21

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN
SEKRETARIAT DAERAH
TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ir. ROOSINDAH NURRIA, ST,MM

Jabatan : ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA

Selanjutnya disebut *Pihak Pertama*

Nama : M. ARIEF MEYDIASTONO, S.Sos

Jabatan : KEPALA BAGIAN ORGANISASI

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut *Pihak Kedua*

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Tana Paser, 2 0 Oktober 2025

Pihak Kedua,	Pihak Pertama,
KEPALA BAGIAN ORGANISASI	ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA,
M. ARIEF MEYDIASTONO, S.Sos	**Ir. ROOSINDAH NURRIA, ST,MM**
NIP. 19680519 198703 1 001	NIP. 19770412 200312 2 008

Lampiran 1 Perjanjian Kinerja

SEKRETARIAT DAERAH
TABEL KINERJA PERUBAHAN
TAHUN 2025

NO	SASARAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	**2**	**3**	**4**
1	Terlaksananya Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	1 Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	7 laporan
2	Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	2 Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	1 dokumen

NO	SUB KEGIATAN	ANGGARAN	
1	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Rp	319.797.000
2	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Rp	48.712.000

Tana Paser, 20 Oktober 2025

Pihak Kedua,
KEPALA BAGIAN ORGANISASI

M. ARIEF MEYDIASTONO, S.Sos
NIP. 19680519 198703 1 001

Pihak Pertama,
ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA,

Ir. ROOSINDAH NURRIA, ST,MM
NIP. 19770412 200312 2 008

Lampiran 2 Perjanjian Kinerja

SEKRETARIAT DAERAH
PENJELASAN KINERJA
TAHUN 2025

Penjelasan Kinerja 1

Uraian Sasaran/

Yang dimaksud dalam sasaran kinerja ini adalah berkaitan dengan bagaimana instansi pemerintah atau organisasi melaksanakan pelayanan terhadap masyarakat secara efektif, efisien, dan sesuai standar yang telah ditetapkan..

Indikator Kinerja

Sasaran kinerja ini memiliki 1 (satu) Indikator kinerja yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian /kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan, antara lain :

NO	URAIAN	RELEVANSI	FORMULASI	SUMBER DATA
1	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Indicator Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana sangat relevan, terutama dalam hal instansi pemerintah atau organisasi yang bertanggung jawab memastikan pelayanan public berjalan efisien dan efektif. Indicator ini dapat membantu menilai seberapa baik proses fasilitasi pengawasan dan penyelesaian masalah dalam pelayanan public.	*Jumlah laporan*	Bagian organisasi

Target Kinerja

Dalam perjanjian kinerja ini, setiap indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut :

INDIKATOR KINERJA	TARGET	PENJELASAN
Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	7	Target ini ditetapkan dengan melihat capaian beberapa tahun sebelumnya, Dimana capaian tahun 2023 sebesar 4, capaian tahun 2024 sebesar 4, maka target rata ditetapkan 7

SEKRETARIAT DAERAH
PENJELASAN KINERJA
TAHUN 2025

Penjelasan Kinerja 2

Uraian Sasaran/

Yang dimaksud dalam sasaran kinerja ini adalah proses untuk memastikan bahwa layanan public yang diberikan oleh pemerintah atau Lembaga public lainnya sudah sesuai dengan standar kualitas yang telah ditetapkan.

Indikator Kinerja

Sasaran kinerja ini memiliki 1 (satu) Indikator kinerja yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian /kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan, antara lain :

NO	URAIAN	RELEVANSI	FORMULASI	SUMBER DATA
1	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Indicator Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksanabisa dikatakan relevan apabila indicator ini bisa memberikan gambaran mengenai kualitas layanan dan pengelolaan admnistrasi. Namun apabila jumlah dokumen sebagai indicator kurang optimal jika tidak mempertimbangan kualitas dari dokumen tersebut.	*jumlah dokumen*	Bagian organisasi

Target Kinerja

Dalam perjanjian kinerja ini, setiap indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut :

INDIKATOR KINERJA	TARGET	PENJELASAN
Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	1	Target ini ditetapkan dengan melihat capaian beberapa tahun sebelumnya, dimana capaian tahun 2023 sebesar 1, capaian tahun 2024 sebesar 1, maka target rata ditetapkan 1

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN
SEKRETARIAT DAERAH
TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ALFANSYAH, SP

Jabatan : ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA

Selanjutnya disebut *Pihak Pertama*

Nama : M. ARIEF MEYDIASTONO, S.Sos

Jabatan : KEPALA BAGIAN ORGANISASI

Selanjutnya disebut *Pihak Kedua*

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Tana Paser, 2 0 Oktober 2025

Pihak Pertama KEPALA BAGIAN ORGANISASI	Pihak Pertama, ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA
M. ARIEF MEYDIASTONO, S.Sos	**ALFANSYAH, SP**
NIP. 19680519 198703 1 001	NIP. 19810504 200901 1 002

Lampiran 1 Perjanjian Kinerja

SEKRETARIAT DAERAH
TABEL KINERJA PERUBAHAN
TAHUN 2025

NO	SASARAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	**2**	**3**	**4**
1	Terlaksananya Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	1 Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	2 dokumen
2	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	2 Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	3 dokumen

NO	SUB KEGIATAN		ANGGARAN
1	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Rp	378.741.699
2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Rp	112.599.000

Tana Paser, 20 Oktober 2025

Pihak Kedua,
KEPALA BAGIAN ORGANISASI

M. ARIEF MEYDIASTONO, S.Sos
NIP. 19680519 198703 1 001

Pihak Pertama,
ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA

ALFANSYAH, SP
NIP. 19810504 200901 1 002

Lampiran 2 Perjanjian Kinerja

SEKRETARIAT DAERAH
PENJELASAN KINERJA
TAHUN 2025

Penjelasan Kinerja 1

Uraian Sasaran/

Yang dimaksud dalam sasaran kinerja ini adalah dua konseppenting dalam upaya memperbaiki efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas pelayanan public di instansi pemerintah. Upaya kinerja adalah upaya untuk meningkatkan kualitas hasil kerja dalam organisasi, termasuk instansi pemerintah. Reformasi Birokrasi adalah proses perombakan atau perubahan struktur dan proses birokrasi dalam pemerintahan untuk menciptakan tata Kelola pemerintahan yang lebih baik.

Indikator Kinerja

Sasaran kinerja ini memiliki 1 (satu) Indikator kinerja yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian /kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan, antara lain :

NO	URAIAN	RELEVANSI	FORMULASI	SUMBER DATA
1	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Indicator Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi bisa relevan jika bertujuan untuk mengetahui Ouput administrasi yang dihasilkan sebagai bagian dari upaya reformasi birokrasi.	*Jumlah laporan*	Bagian organisasi

Target Kinerja

Dalam perjanjian kinerja ini, setiap indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut :

INDIKATOR KINERJA	TARGET	PENJELASAN
Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	2	Target ini ditetapkan dengan melihat capaian beberapa tahun sebelumnya, dimana capaian tahun 2023 sebesar 2, capaian tahun 2024 sebesar 2, maka target rata ditetapkan 2

SEKRETARIAT DAERAH
PENJELASAN KINERJA
TAHUN 2025

Penjelasan Kinerja 2

Uraian Sasaran/

Yang dimaksud dalam sasaran kinerja ini adalah proses yang melibatkan beberapa tahapan dan pihak untuk memastikan pelaksanaan tugas dan pencapaian tujuan pemerintah daerah berjalan dengan efektif dan efisien.

Indikator Kinerja

Sasaran kinerja ini memiliki 1 (satu) Indikator kinerja yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian /kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan, antara lain :

NO	URAIAN	RELEVANSI	FORMULASI	SUMBER DATA
1	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Indicator Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah ini relevan apabila untuk menilai aktivitas administrasi atau prses dokumentasi dalam mendukung kinerja pemerintah daerah.	*Jumlah Dokumen*	Bagian organisasi

Target Kinerja

Dalam perjanjian kinerja ini, setiap indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut :

INDIKATOR KINERJA	TARGET	PENJELASAN
Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	2	Target ini ditetapkan dengan melihat capaian beberapa tahun sebelumnya, dimana capaian tahun 2023 sebesar 2, capaian tahun 2024 sebesar 2, maka target rata ditetapkan 2

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN
SEKRETARIAT DAERAH
TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ABDUL KADIR, SS. MA

Jabatan : KEPALA BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN

Selanjutnya disebut *Pihak Pertama*

Nama : NUR ASNI, SE. MM

Jabatan : PLT. ASISTEN ADMINISTRASI UMUM

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut *Pihak Kedua*

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Tana Paser, 20 Oktober 2025

Pihak Kedua	Pihak Pertama,
PLT. ASISTEN ADMINISTRASI UMUM	KEPALA BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN
NUR ASNI, SE, MM	**ABDUL KADIR, SS, MA**
NIP. 19721215 199803 2 008	NIP. 19760606 200604 1 015

Lampiran 1 Perjanjian Kinerja

SEKRETARIAT DAERAH
TABEL KINERJA PERUBAHAN
TAHUN 2025

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	1 Persentase Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	100 Persen

NO	KEGIATAN	ANGGARAN
1	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Rp. 5.484.011.895

Tana Paser, 20 Oktober 2025

Pihak Kedua
PLT. ASISTEN ADMINISTRASI UMUM

NUR ASNI, SE, MM
NIP. 19721215 199803 2 008

Pihak Pertama,
KEPALA BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN

ABDUL KADIR, SS, MA
NIP. 19760606 200604 1 015

SEKRETARIAT DAERAH
PENJELASAN KINERJA
TAHUN 2025

Penjelasan Kinerja 1

Uraian Sasaran/

Yang dimaksud dalam sasaran kinerja ini berkaitan dengan bagaimana protocol dan komunikasi formal dijalankan untuk mendukung efektivitas fungsi pimpinan. Secara garis besar melibatkatkan beberapa aspek antara lain; penaturan acara dan tata laksana, koordinasi dengan pihak terkait, pengelolaan informasi dan komunikasi, penyusunan pesan dan penyampaian, penyelesaian kendala dan dinamika dilapangan.

Indikator Kinerja

Sasaran kinerja ini memiliki 1 (satu) Indikator kinerja yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian /kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan, antara lain :

NO	URAIAN	RELEVANSI	FORMULASI	SUMBER DATA
1	Persentase Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Indicator Persentase Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan bisa menjadi relevan tergantung pada konteks dan tujuan. Indicator ini digunakan bertujuan untuk mengukur seberapa efektif suatu tim dalam melaksanakan tugas terkait protocol dan komunikasi pimpinan, khususnya dalam mendukung kegiatan pimpinan.	*Jumlah kegiatan yang terlaksana di bagi jumlah kegiatan yang direncanakan dikali 100*	Bagian Prokopim

Target Kinerja

Dalam perjanjian kinerja ini, setiap indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut :

INDIKATOR KINERJA	TARGET	PENJELASAN
Persentase Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	100	Target ini ditetapkan dengan melihat capaian beberapa tahun sebelumnya, dimana capaian tahun 2023 sebesar 100, capaian tahun 2024 sebesar 100, maka target rata ditetapkan 100

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN
SEKRETARIAT DAERAH
TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : AJIE RISALDI JOGI NUGRAHA, S.STP

Jabatan : SUBBAG PROTOKOL

Selanjutnya disebut *Pihak Pertama*

Nama : ABDUL KADIR, SS, MA

Jabatan : KEPALA BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut *Pihak Kedua*

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Tana Paser, 2 0 Oktober 2025

Pihak Kedua,	Pihak Pertama
KEPALA BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN	KASUBBAG PROTOKOL
ABDUL KADIR, SS, MA	**AJIE RISALDI JOGI NUGRAHA, S.STP**
NIP. 19760606 200604 1 015	NIP. 19941221 201609 1 001

Lampiran 1 Perjanjian Kinerja

SEKRETARIAT DAERAH
TABEL KINERJA PERUBAHAN
TAHUN 2025

NO	SASARAN KINERJA SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Terlaksananya Fasilitasi Keprotokolan	1 Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan	12 Laporan

NO	SUB KEGIATAN	ANGGARAN
1	Fasilitasi Keprotokolan	Rp 2.743.837.783

Tana Paser, 20 Oktober 2025

Pihak Kedua,	Pihak Pertama
KEPALA BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN	KASUBBAG PROTOKOL
ABDUL KADIR, SS, MA	**AJIE RISALDI JOGI NUGRAHA, S.STP**
NIP. 19760606 200604 1 015	NIP. 19941221 201609 1 001

Lampiran 2 Perjanjian Kinerja

SEKRETARIAT DAERAH
PENJELASAN KINERJA
TAHUN 2025

Penjelasan Kinerja 1

Uraian Sasaran/

Yang dimaksud dalam sasaran kinerja ini merujuk pada pelaksanaan tugas-tugas yang berkaitan dengan pelayanan protokoler dalam suatu organisasi, Lembaga pemerintahan atau acara resmi. Kegiatan ini bertujuan untuk memastikan bahwa semua aspek terkait penyambutan, penataa acara, serta aturan tata tempat, tata penghormatan dan tata upacara terlaksana dengan baik dan sesuai.

Indikator Kinerja

Sasaran kinerja ini memiliki 1 (satu) Indikator kinerja yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian /kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan, antara lain :

NO	URAIAN	RELEVANSI	FORMULASI	SUMBER DATA
1	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan	Indicator Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan dapat relevan tergantung pada tujuan organisasi. Jika laporan tersebut dianggap penting untuk mengukur seberapa sering dan efektif.	*Jumlah laporan*	Bagian Prokopim

Target Kinerja

Dalam perjanjian kinerja ini, setiap indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut :

INDIKATOR KINERJA	TARGET	PENJELASAN
Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan	12	Target ini ditetapkan dengan melihat capaian beberapa tahun sebelumnya, dimana capaian tahun 2023 sebesar 12, capaian tahun 2024 sebesar 12, maka target rata ditetapkan 12

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN
SEKRETARIAT DAERAH
TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : DINA FITRIANTY, S.SOS, MA

Jabatan : PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT AHLI MUDA

Selanjutnya disebut *Pihak Pertama*

Nama : ABDUL KADIR, SS, MA

Jabatan : KEPALA BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut *Pihak Kedua*

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Tana Paser, 20 Oktober 2025

Pihak Kedua	Pihak Pertama
KEPALA BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN	PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT AHLI MUDA
ABDUL KADIR, SS, MA	**DINA FITRIANTY, S.SOS. MA**
NIP. 19760606 200604 1 015	NIP. 19820109 201001 2 016

Lampiran 1 Perjanjian Kinerja

SEKRETARIAT DAERAH

TABEL KINERJA PERUBAHAN

TAHUN 2025

NO	SASARAN KINERJA SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Terlaksananya Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	1 Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	12 Laporan

NO	SUB KEGIATAN	ANGGARAN
1	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Rp 1.451.194.013

Tana Paser, 20 Oktober 2025

Pihak Kedua	Pihak Pertama
KEPALA BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN	PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT AHLI MUDA
ABDUL KADIR, SS, MA	**DINA FITRIANTY, S.SOS. MA**
NIP. 19760606 200604 1 015	NIP. 19820109 201001 2 016

Lampiran 2 Perjanjian Kinerja

SEKRETARIAT DAERAH
PENJELASAN KINERJA
TAHUN 2025

Penjelasan Kinerja 1

Uraian Sasaran/

Yang dimaksud dalam sasaran kinerja ini adalah aktivitas yang bertujuan untuk mendukung kelancaran komunikasi dan koordinasi bagi pimpinan dilingkungan instansi pemerintah atau organisasi. Kegiatan ini mencakup berbagai aspek.

Indikator Kinerja

Sasaran kinerja ini memiliki 1 (satu) Indikator kinerja yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian /kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan, antara lain :

NO	URAIAN	RELEVANSI	FORMULASI	SUMBER DATA
1	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Indicator Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan bisa relevan apabila memang tujuan dari indicator tersebut adalah untuk mengukur seberapa aktif fungsi fasilitasi komunikasi yang dilakukan dalam mendukung tugas pimpinan. Agar indicator ini benar benar bermakna perlu memperhatikan beberapa aspek..	*Jumlah laporan*	Bagian Prokopim

Target Kinerja

Dalam perjanjian kinerja ini, setiap indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut :

INDIKATOR KINERJA	TARGET	PENJELASAN
Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	12	Target ini ditetapkan dengan melihat capaian beberapa tahun sebelumnya, dimana capaian tahun 2023 sebesar 12, capaian tahun 2024 sebesar 12, maka target rata ditetapkan 12

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN
SEKRETARIAT DAERAH
TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : IKA MARSILIA SETYORINI, SS

Jabatan : PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT AHLI MUDA

Selanjutnya disebut *Pihak Pertama*

Nama : ABDUL KADIR, SS. MA

Jabatan : KEPALA BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut *Pihak Kedua*

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Tana Paser, 2 0 Oktober 2025

Pihak Kedua,	Pihak Pertama,
KEPALA BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN	PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT AHLI MUDA
ABDUL KADIR, SS, MA	**IKA MARSILIA SETYORINI, SS**
NIP. 19760606 200604 1 015	NIP. 19830323 200604 2 017

Lampiran 1 Perjanjian Kinerja

SEKRETARIAT DAERAH
TABEL KINERJA PERUBAHAN
TAHUN 2025

NO	SASARAN KINERJA SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Terlaksananya Pendokumentasian Tugas Pimpinan	1 Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan	12 Laporan

NO	SUB KEGIATAN	ANGGARAN
1	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Rp. 1.288.980.099

Tana Paser, 20 Oktober 2025

Pihak Kedua,
KEPALA BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN

ABDUL KADIR, SS, MA
NIP. 19760606 200604 1 015

Pihak Pertama ,
PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT AHLI MUDA

IKA MARSILIA SETYORINI, SS
NIP. 19830323 200604 2 017

Lampiran 2 Perjanjian Kinerja

SEKRETARIAT DAERAH
PENJELASAN KINERJA
TAHUN 2025

Penjelasan Kinerja 1

Uraian Sasaran/

Yang dimaksud dalam sasaran kinerja ini adalah proses mendokumentasikan semua aktivitas dan keputusan yang dilakukan oleh pimpinan dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Ini bertujuan untuk mencatat dan menyimpan berbagai informasi penting terkait pelaksanaan tugas pimpinan agar dapat dijadikan referensi bahan evaluasi dan sebagai arsip formal dalam organisasi.

Indikator Kinerja

Sasaran kinerja ini memiliki 1 (satu) Indikator kinerja yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian /kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan, antara lain :

NO	URAIAN	RELEVANSI	FORMULASI	SUMBER DATA
1	Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Indicator Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan dapat relevan jika tujuan utamanya adalah untuk menilai efektivitas dan akuntabilitas dalam mendokumentasikan kegiatan atau tugas yang dilakukan oleh pimpinan. Namun relevansinya tergantung pada beberapa hal seperti apakah jumlah dokumen yang dihasilkan mencerminkan	*Jumlah laporan*	Bagian Prokopim

		peningkatan kualitas atau efisiensi dalam pendokumentasian tersebut atau hanya kualitas tanpa memperhatikan aspek lainnya kualitas dan ketercapaian target yang lebih strategis.		

Target Kinerja

Dalam perjanjian kinerja ini, setiap indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut :

INDIKATOR KINERJA	TARGET	PENJELASAN
Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan	12	Target ini ditetapkan dengan melihat capaian beberapa tahun sebelumnya, dimana capaian tahun 2023 sebesar 12, capaian tahun 2024 sebesar 12, maka target rata ditetapkan 12

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN
SEKRETARIAT DAERAH
TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : MUHAMMAD YATIMAN, S.IP. M.Si

Jabatan : KEPALA BAGIAN UMUM

Selanjutnya disebut *Pihak Pertama*

NAMA : NUR ASNI, SE. MM

JABATAN : Plt. ASISTEN ADMINISTRASI UMUM

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut *Pihak Kedua*

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Tana Paser, 20 Oktober 2025

Pihak Kedua, PLT. ASISTEN ADMINISTRASI UMUM	Pihak Pertama, KEPALA BAGIAN UMUM,
NUR ASNI, SE, MM	**MUHAMMAD YATIMAN, S.IP. M.Si**
NIP. 19721215 199803 2 008	NIP. 19870401 200701 1 001

Lampiran 1 Perjanjian Kinerja

SEKRETARIAT DAERAH
TABEL KINERJA PERUBAHAN
TAHUN 2025

NO	SASARAN KINERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	1 Persentase Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang difasilitasi	100 persen
2	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	2 Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah yang terpenuhi	100 persen
3	Administrasi Umum Perangkat Daerah	3 Tingkat Kepuasan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 persen
4	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4 Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terpenuhi	100 persen
5	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	5 Persentase Pemeliharaan BMD	100 persen
6	Fasilitasi Kerumahtanggan Sekretariat Daerah	6 Persentase Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga yang difasilitasi	100 persen

NO	KEGIATAN	ANGGARAN
1	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rp. 995.240.000
2	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp. 30.613.116.514
3	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp. 31.066.468.395
4	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp. 15.699.150.600
5	Fasilitasi Kerumahtanggan Sekretariat Daerah	Rp. 5.745.677.960
6	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Rp. 1.531.676.000

Tana Paser, 20 Oktober 2025

Pihak Kedua,
PLT. ASISTEN ADMINISTRASI UMUM

NUR ASNI, SE, MM
NIP. 19721215 199803 2 008

Pihak Pertama,
KEPALA BAGIAN UMUM,

MUHAMMAD YATIMAN, S.IP. M.Si
NIP. 19870401 200701 1 001

Lampiran 2 Perjanjian Kinerja

SEKRETARIAT DAERAH
PENJELASAN KINERJA
TAHUN 2025

Penjelasan Kinerja 1

Yang dimaksud dalam sasaran kinerja ini adalah Kinerja ini bertujuan untuk mendukung kegiatan operasional KDH/WKDH dalam melaksanakan tugas tugas yang mendukung fungsi dan layanan public dalam keberhasilan program program yang berorientasi pada kesejahteraan rakyat

Indikator Kinerja

Sasaran kinerja ini memiliki 1 (satu) Indikator kinerja yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian /kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan, antara lain :

NO	URAIAN	RELEVANSI	FORMULASI	SUMBER DATA
1	Persentase Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang difasilitasi	Indicator kinerja Persentase Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang difasilitasi cukup relevan terutma untuk memastikan akuntabilitas dan efektivitas penggunaan anggaran public.	*Total biaya admininistrasi dan operasional di bagi total anggaran yang dikelola dikali 100*	Bagian Perencanaan

Target Kinerja

Dalam perjanjian kinerja ini, setiap indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut :

INDIKATOR KINERJA	TARGET	PENJELASAN
Persentase Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang difasilitasi	100	Target ini ditetapkan dengan melihat capaian beberapa tahun sebelumnya, dimana capaian tahun 2023 sebesar 100, capaian tahun 2024 sebesar 100, maka target rata ditetapkan 100

SEKRETARIAT DAERAH
PENJELASAN KINERJA
TAHUN 2025

Penjelasan Kinerja 2

Uraian Sasaran/

Yang dimaksud dalam sasaran kinerja ini adalah penilaian atas efektivitas, efisiensi, dan produktivitas dalam pengelolaan sumber daya manusia pada instansi atau Lembaga pemerintah daerah.

Indikator Kinerja

Sasaran kinerja ini memiliki 1 (satu) Indikator kinerja yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian /kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan, antara lain :

NO	URAIAN	RELEVANSI	FORMULASI	SUMBER DATA
1	Persentase administrasi umum perangkat daerah yang terpenuhi	Indicator Persentase administrasi umum perangkat daerah yang terpenuhi relevan jika ingin mengukur efektivitas dan efisiensi pelaksanaan tugas administrasi perangkat daerah dalam memenuhi berbagai persyaratan dan standar yang telah ditetapkan. Indikator ini membantu dalam menilai kinerja administrative secara kuantitatif, termasuk ketepatan waktu kelengkapan dokumen dan kesesuaian prosedur..	*Jumlah administrasi yang terpenuhi dibagi total administrasi yang diharapkan kali 100*	Bagian umum

Target Kinerja

Dalam perjanjian kinerja ini, setiap indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut :

INDIKATOR KINERJA	TARGET	PENJELASAN
Persentase administrasi umum perangkat daerah yang terpenuhi	100	Target ini ditetapkan dengan melihat capaian beberapa tahun sebelumnya, dimana capaian tahun 2023 sebesar 100, capaian tahun 2024 sebesar 100, maka target rata ditetapkan 100

SEKRETARIAT DAERAH
PENJELASAN KINERJA
TAHUN 2025

Penjelasan Kinerja 3

Uraian Sasaran/

Yang dimaksud dalam sasaran kinerja ini adalah kemampuan atau pencapaian perangkat daerah dalam melaksanakan fungsi administrasi dan manajerial yang mendukung kelancaran tugas pokok dan fungsi instansi pemerintah. Kinerja administrasi umum Meliputi berbagai aspek antara lain; Pengelolaan keuangan, administrasi kepegawaian, penyusunan dan pengelolaan dokumen, Pelayanan Publik, dan pemantauan dan evaluasi.

Indikator Kinerja

Sasaran kinerja ini memiliki 1 (satu) Indikator kinerja yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian /kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan, antara lain :

NO	URAIAN	RELEVANSI	FORMULASI	SUMBER DATA
1	Tingkat kepuasan pelayanan administrasi umum perangkat daerah	Indicator Tingkat kepuasan pelayanan administrasi umum perangkat daerah cukup relevan untuk mengukur efektivitas dan efisiensi pelayanan administrasi yang diberikan kepada ASN dilingkungan sekretariat daerah, atau pemangku kepentingan lainnya. Indikator ini membantu perangkat daerah memahami tingkat kepuasan pengguna layanan, mempebaiki kualitas layanan, dan membuat keputusan perbaikan yang tepat	*Hasil survey*	Bagian umum

Target Kinerja

Dalam perjanjian kinerja ini, setiap indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut :

INDIKATOR KINERJA	TARGET	PENJELASAN
Tingkat kepuasan pelayanan administrasi umum perangkat daerah	100	Target ini ditetapkan dengan melihat capaian beberapa tahun sebelumnya, dimana capaian tahun 2023 sebesar 100, capaian tahun 2024 sebesar 100, maka target rata ditetapkan 100

SEKRETARIAT DAERAH
PENJELASAN KINERJA
TAHUN 2025

Penjelasan Kinerja 4

Uraian Sasaran/

Yang dimaksud dalam sasaran kinerja ini meliputi semua aktivitas yang mendukung pelaksanaan tugas pemerintah di tingkat daerah. Kegiatan ini bertujuan untuk memastikan kelancaran pelaksanaan fungsi-fungsi pemerintah daerah dalam rangka pelayanan public dan pembangunan daerah.

Indikator Kinerja

Sasaran kinerja ini memiliki 1 (satu) Indikator kinerja yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian /kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan, antara lain :

NO	URAIAN	RELEVANSI	FORMULASI	SUMBER DATA
1	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang terpenuhi	Indicator Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang terpenuhi cukup relevan, terutama untuk menilai efektivitas dan efisiensi pemerintah daerah dalam menyediakan jasa penunjang. Jasa penunjang ini mencakup berbagai kebutuhan, seperti transportasi, logistic, fasilitasi administrasi dan sumber daya lainnya yang diperlukan untuk mendukung kelancaran urusan pemerintah	*Jumlah jas penunjang yang terpenuhi di bagi jumlah total kebutuhan jasa penunjang kali 100*	Bagian umum

Target Kinerja

Dalam perjanjian kinerja ini, setiap indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut :

INDIKATOR KINERJA	TARGET	PENJELASAN
Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang terpenuhi	100	Target ini ditetapkan dengan melihat capaian beberapa tahun sebelumnya, dimana capaian tahun 2023 sebesar 100, capaian tahun 2024 sebesar 100, maka target rata ditetapkan 100

SEKRETARIAT DAERAH
PENJELASAN KINERJA
TAHUN 2025

Penjelasan Kinerja 5

Uraian Sasaran/

Yang dimaksud dalam sasaran kinerja ini adalah bagian dari upaya menjaga asset daerah agar tetap dalam kondisi baik, layak pakai dan dapat memberikan manfaat optimal bagi pelayanan public. Pemeliharaan barang milik daerah mencakup kegiatan perawatan, perbaikan, hingga perawatan, perbaikan hingga penggantian suku cadang atau komponen agar barang atau asset tersebut tetap berfungsi seusai peruntukannya.

Indikator Kinerja

Sasaran kinerja ini memiliki 1 (satu) Indikator kinerja yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian /kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan, antara lain :

NO	URAIAN	RELEVANSI	FORMULASI	SUMBER DATA
1	Persentase pemeliharaan BMD	Indicator Persentase pemeliharaan BMD dapat dianggap relevan, tergantung pada tujuan dan konteksnya. Indikator ini mengukur sejauh mana pemeliharaan BMD dilakukan secara efektif untuk memastikan keberlanjutan dan penggunaan asset daerah dalam kondisi yang optimal. BMD seperti kendaraan, Gedung atau infrastruktur lainnya membutuhkan pemeliharaan yang baik untuk mencegah kerusakan atau penurunan nilai guna.	*Jumlah BMD yang terpelihara di bagi jumlah BMD yang perlu dipelihara dikali 100*	Bagian umum

Target Kinerja

Dalam perjanjian kinerja ini, setiap indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut :

INDIKATOR KINERJA	TARGET	PENJELASAN
Persentase pemeliharaan BMD	100	Target ini ditetapkan dengan melihat capaian beberapa tahun sebelumnya, dimana capaian tahun 2023 sebesar 100, capaian tahun 2024 sebesar 100, maka target rata ditetapkan 100

SEKRETARIAT DAERAH
PENJELASAN KINERJA
TAHUN 2025

Penjelasan Kinerja 6

Uraian Sasaran/

Yang dimaksud dalam sasaran kinerja ini umumnya mencakup upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam mendukung kelancaran operasional administrasi pemerintahan yang berkaitan dengan kebutuhan rumah tangga dinas atau rumah tangga pejabat daerah. Kegiatan ini melibatkan berbagai asmpek seperti penyediaan kebutuhan pokok untuk mendukung keberhasilan tugas-tugas pemerintahan.

Indikator Kinerja

Sasaran kinerja ini memiliki 1 (satu) Indikator kinerja yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian /kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan, antara lain :

NO	URAIAN	RELEVANSI	FORMULASI	SUMBER DATA
1	Persentase penyediaan kebutuhan rumah tangga yang di fasilitasi	Indicator Persentase penyediaan kebutuhan rumah tangga yang di fasilitasi dapat relevan untuk mengukur sejauh mana suatu organisasi atau pemerintah menyediakan kebutuhan rumah tangga seperti pangan, air bersih, energi dan barang-barang lainnya yang dibutuhkan oleh masyarakat.	*Jumlah rumah tangga yang terpenuhi kebutuhannya dibagi jumlah rumah tangga yang diharapkan untuk terpenuhinya kebutuhannya dikali 100*	Bagian umum

Target Kinerja

Dalam perjanjian kinerja ini, setiap indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut :

INDIKATOR KINERJA	TARGET	PENJELASAN
Persentase penyediaan kebutuhan rumah tangga yang di fasilitasi	100	Target ini ditetapkan dengan melihat capaian beberapa tahun sebelumnya, dimana capaian tahun 2023 sebesar 100, capaian tahun 2024 sebesar 100, maka target rata ditetapkan 100

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN
SEKRETARIAT DAERAH
TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Hj. NURHIDAYATI, SE

Jabatan : ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR AHLI MUDA

Selanjutnya disebut *Pihak Pertama*

Nama : MUHAMMAD YATIMAN, S.IP, M.Si

Jabatan : KEPALA BAGIAN UMUM

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut *Pihak Kedua*

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Tana Paser, 2 0 Oktober 2025

Pihak Kedua	Pihak Pertama,
KEPALA BAGIAN UMUM	ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR AHLI MUDA
MUHAMMAD YATIMAN, S.IP. M.Si	**Hj. NURHIDAYATI, SE**
NIP. 19870401 200701 1 001	NIP. 197210051998032007

Lampiran 1 Perjanjian Kinerja

SEKRETARIAT DAERAH
TABEL KINERJA PERUBAHAN
TAHUN 2025

NO	SASARAN KINERJA SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	12 dokumen
2	Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	2 Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	180 dokumen
3	Terlaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	3 Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	8 Orang
4	Terlaksanany Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 laporan

NO	SUB KEGIATAN	ANGGARAN
1	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Rp. 584.240.000
2	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang - Undangan	Rp. 411.000.000
3	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Rp. 300.000.000
4	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp. 5.560.210.997

Tana Paser, 20 Oktober 2025

Pihak Kedua
KEPALA BAGIAN UMUM

MUHAMMAD YATIMAN, S.IP. M.Si
NIP. 19870401 200701 1 001

Pihak Pertama,
ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA
APARATUR AHLI MUDA

Hj. NURHIDAYATI, SE
NIP. 197210051998032007

Lampiran 2 Perjanjian Kinerja

SEKRETARIAT DAERAH
PENJELASAN KINERJA
TAHUN 2025

Penjelasan Kinerja 1

Uraian Sasaran/

Yang dimaksud dalam sasaran kinerja ini biasanya mencakup tuga dan tanggung jawab yang berkaitan dengan pengelolaan data dan administrasi pegawai dalam suatu organisasi atau instansi.

Indikator Kinerja

Sasaran kinerja ini memiliki 1 (satu) Indikator kinerja yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian /kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan, antara lain :

NO	URAIAN	RELEVANSI	FORMULASI	SUMBER DATA
1	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian dapan relevan apabila digunakan untuk menilai output administrasi dalam konteks manajemen kepegawaian. Namun relevansi ini tergantung pada tujuan indicator tersebut.	*Jumlah dokumen*	Bagian umum

Target Kinerja

Dalam perjanjian kinerja ini, setiap indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut :

INDIKATOR KINERJA	TARGET	PENJELASAN
Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	100	Target ini ditetapkan dengan melihat capaian beberapa tahun sebelumnya , dimana capaian tahun 2023 sebesar 100, capaian tahun 2024 sebesar 100, maka target rata ditetapkan 100

SEKRETARIAT DAERAH
PENJELASAN KINERJA
TAHUN 2025

Penjelasan Kinerja 2

Uraian Sasaran/

Yang dimaksud dalam sasaran kinerja ini merujuk pada pelaksanaan kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan kemampuan para pihak terkait dalam mengimplementasikan peraturan yang berlaku..

Indikator Kinerja

Sasaran kinerja ini memiliki 1 (satu) Indikator kinerja yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian /kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan, antara lain :

NO	URAIAN	RELEVANSI	FORMULASI	SUMBER DATA
1	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan bisa dikatakan relevan jika tujuannya adalah untuk mengukur tingkat partisipasi atau cakupan pelaksanaan program bimbingan teknis tersebut namun relevansinya tergantung pada hubungan langsung indicator ini dengan tujuan yang ingin di capai	*Jumlah peserta yang mengikuti bimtek*	Bagian umum

Target Kinerja

Dalam perjanjian kinerja ini, setiap indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut :

INDIKATOR KINERJA	TARGET	PENJELASAN
Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	180	Target ini ditetapkan dengan melihat capaian beberapa tahun sebelumnya , dimana capaian tahun 2023 sebesar 180, capaian tahun 2024 sebesar 180, maka target rata ditetapkan 180

SEKRETARIAT DAERAH
PENJELASAN KINERJA
TAHUN 2025

Penjelasan Kinerja 3

Uraian Sasaran/

Yang dimaksud dalam sasaran kinerja ini mengacu pada pelaksanaan serangkaian pemeriksanaan Kesehatan rutin untuk memastikan kondisi fisik dan mental kepala daerah serta wakil kepala daerah dalam menjalankan tugas pemerintahan...

Indikator Kinerja

Sasaran kinerja ini memiliki 1 (satu) Indikator kinerja yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian /kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan, antara lain :

NO	URAIAN	RELEVANSI	FORMULASI	SUMBER DATA
1	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah bisa relevan tergantung pada tujuan pengukuran dan konteks kebijakan	*Jumlah peserta yang mengikuti bimtek*	Bagian umum

Target Kinerja

Dalam perjanjian kinerja ini, setiap indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut :

INDIKATOR KINERJA	TARGET	PENJELASAN
Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	8	Target ini ditetapkan dengan melihat capaian beberapa tahun sebelumnya , dimana capaian tahun 2023 sebesar 8, capaian tahun 2024 sebesar 8, maka target rata ditetapkan 8

SEKRETARIAT DAERAH
PENJELASAN KINERJA
TAHUN 2025

Penjelasan Kinerja 4

Uraian Sasaran/

Yang dimaksud dalam sasaran kinerja ini merujuk pada evaluasi sejauh mana kegiatan tersebut dilaksanakan secara efektif, efisien dan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.

Indikator Kinerja

Sasaran kinerja ini memiliki 1 (satu) Indikator kinerja yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian /kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan, antara lain :

NO	URAIAN	RELEVANSI	FORMULASI	SUMBER DATA
1	Jumlah laporan penyelenggaran rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah Jumlah laporan penyelenggaran rapat koordinasi dan konsultasi SKPD dapat relevan tetapi perlu dianalisi lebih dalam untuk memastikan bahwa indicator ini benar benar mencerminkan kinerja yang diinginkan.	*Jumlah rapat koordinasi/konsultasi yang telah dilaksanakan*	Bagian umum

Target Kinerja

Dalam perjanjian kinerja ini, setiap indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut :

INDIKATOR KINERJA	TARGET	PENJELASAN
Jumlah laporan penyelenggaran rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	150	Target ini ditetapkan dengan melihat capaian beberapa tahun sebelumnya , dimana capaian tahun 2023 sebesar 150, capaian tahun 2024 sebesar 150, maka target rata ditetapkan 150

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN
SEKRETARIAT DAERAH
TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : BONDAN YUDHANARKO, A.Md

Jabatan : ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA

Selanjutnya disebut *Pihak Pertama*

Nama : MUHAMMAD YATIMAN, S.IP. M.Si

Jabatan : KEPALA BAGIAN UMUM

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut *Pihak Kedua*

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Tana Paser, 20 Oktober 2025

Pihak Kedua	Pihak Pertama,
KEPALA BAGIAN UMUM	ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA
MUHAMMAD YATIMAN, S.IP. M.Si	**BONDAN YUDHANARKO, A.Md**
NIP. 19870401 200701 1 001	NIP. 19840506 200604 1 009

Lampiran 1 Perjanjian Kinerja

SEKRETARIAT DAERAH
TABEL PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN
TAHUN 2025

NO	SASARAN KINERJA SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA		TARGET
1	2	3		4
1	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	1	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	16 paket
2	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	2	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	17 paket
3	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	3	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	30 paket
4	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	4	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	9 paket
5	Tersediaan Pakian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	5	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	10 Paket
6	Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	6	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 laporan
7	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	7	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	3 unit
8	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	8	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	20 unit
9	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	9	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 unit

10	Tersedianya jasa pelayanan Umum Kantor	10	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	12 laporan

NO	SUB KEGIATAN	ANGGARAN
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Rp. 177.285.542
2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp. 10.306.279.028
3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Rp. 582.027.552
4	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Rp. 85.094.930
5	Penyediaan Pakian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Rp. 1.231.676.000
6	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp. 10.306.279.028
7	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Rp. 948.735.600
8	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Rp. 1.258.128.950
9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Rp. 13.492.286.050
10	Penyediaan jasa pelayanan Umum Kantor	Rp. 9.688.893.456

Tana Paser, 20 Oktober 2025

Pihak Kedua	Pihak Pertama,
KEPALA BAGIAN UMUM	ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA
MUHAMMAD YATIMAN, S.IP. M.Si	**BONDAN YUDHANARKO, A.Md**
NIP. 19870401 200701 1 001	NIP. 19840506 200604 1 009

Lampiran 2 Perjanjian Kinerja

SEKRETARIAT DAERAH
PENJELASAN KINERJA
TAHUN 2025

Penjelasan Kinerja 1

Uraian Sasaran/

Yang dimaksud dalam sasaran kinerja ini mencakup seluruh proses yang bertujuan untuk memastikan instalasi listrik dan system penerangan dibangunan kantor berfungsi dengan baik, aman, dan efisien.

Indikator Kinerja

Sasaran kinerja ini memiliki 1 (satu) Indikator kinerja yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian /kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan, antara lain :

NO	URAIAN	RELEVANSI	FORMULASI	SUMBER DATA
1	Jumlah paket komponen instalasi lsitrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	indikator Jumlah paket komponen instalasi lsitrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan dapat relevan dilihat dari tingkat tujuannya di ukur efektivitas pemenuhan kebutuhan listrik dan penerangan di kantor	*Jumlah paket*	Bagian umum

Target Kinerja

Dalam perjanjian kinerja ini, setiap indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut :

INDIKATOR KINERJA	TARGET	PENJELASAN
Jumlah paket komponen instalasi lsitrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	16	Target ini ditetapkan dengan melihat capaian beberapa tahun sebelumnya, dimana capaian tahun 2023 sebesar 16 capaian tahun 2024 sebesar 16, maka target rata ditetapkan 16

Lampiran 2 Perjanjian Kinerja

SEKRETARIAT DAERAH
PENJELASAN KINERJA
TAHUN 2025

Penjelasan Kinerja 2

Uraian Sasaran/

Yang dimaksud dalam sasaran kinerja ini merujuk pada pelaksanaan aktivitas yang mendukung kelancaran operasionalkantor melalui pengadaan dan pemenuhan kebutuhan sarana kerja.

Indikator Kinerja

Sasaran kinerja ini memiliki 1 (satu) Indikator kinerja yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian /kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan, antara lain :

NO	URAIAN	RELEVANSI	FORMULASI	SUMBER DATA
1	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Indikator Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan dapat relevan tergantung pada konteks dan karena tujuan utamana nya adalah menyediakan kebutuhan operasional secara kuantitatif.	*Jumlah paket yang disediakan*	Bagian umum

Target Kinerja

Dalam perjanjian kinerja ini, setiap indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut :

INDIKATOR KINERJA	TARGET	PENJELASAN
Jumlah paket komponen instalasi lsitrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	17	Target ini ditetapkan dengan melihat capaian beberapa tahun sebelumnya, dimana capaian tahun 2023 sebesar 17 capaian tahun 2024 sebesar 17, maka target rata ditetapkan 17

Lampiran 2 Perjanjian Kinerja

SEKRETARIAT DAERAH
PENJELASAN KINERJA
TAHUN 2025

Penjelasan Kinerja 3

Uraian Sasaran/

Yang dimaksud dalam sasaran kinerja ini merupakan bagian dari kegiatan administrasi yang berfokus pada pengelolaan dan pemenuhan kebutuhan logistic kantor untuk mendukung kelancaran operasional kantor.

Indikator Kinerja

Sasaran kinerja ini memiliki 1 (satu) Indikator kinerja yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian /kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan, antara lain :

NO	URAIAN	RELEVANSI	FORMULASI	SUMBER DATA
1	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	Indikator Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan indicator ini bisa relevan apabila bertujuan untuk memastikan ketersediaan bahan logistic untuk mendukung kelancaran operasional	*Jumlah paket yang disediakan*	Bagian umum

Target Kinerja

Dalam perjanjian kinerja ini, setiap indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut :

INDIKATOR KINERJA	TARGET	PENJELASAN
Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	30	Target ini ditetapkan dengan melihat capaian beberapa tahun sebelumnya, dimana capaian tahun 2023 sebesar 30 capaian tahun 2024 sebesar 30, maka target rata ditetapkan 30

SEKRETARIAT DAERAH
PENJELASAN KINERJA
TAHUN 2025

Penjelasan Kinerja 4

Uraian Sasaran/

Yang dimaksud dalam sasaran kinerja ini mengacu pada aktivitas yang mendukung penyediaan dokumen dalam rangka mendukung operasional PD atau kegiatan pemerintah dan mendukung kelancaran administrasi PD.

Indikator Kinerja

Sasaran kinerja ini memiliki 1 (satu) Indikator kinerja yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian /kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan, antara lain :

NO	URAIAN	RELEVANSI	FORMULASI	SUMBER DATA
1	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Indikator Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan ini relevan jika tujuan program atau kegiatan tersebut memang berfokus pada distribusi barang cetakan dan penggandaan.	*Jumlah paket yang disediakan*	Bagian umum

Target Kinerja

Dalam perjanjian kinerja ini, setiap indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut :

INDIKATOR KINERJA	TARGET	PENJELASAN
Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	9	Target ini ditetapkan dengan melihat capaian beberapa tahun sebelumnya, dimana capaian tahun 2023 sebesar 9 capaian tahun 2024 sebesar 9, maka target rata ditetapkan 9

SEKRETARIAT DAERAH
PENJELASAN KINERJA
TAHUN 2025

Penjelasan Kinerja 5

Uraian Sasaran/

Yang dimaksud dalam sasaran kinerja ini bertujuan untuk mendukung penampilan, identitas, serta profesionalisme kepala daerah dan wakil kepala daerah dalam melaksanakan tugasnya.

Indikator Kinerja

Sasaran kinerja ini memiliki 1 (satu) Indikator kinerja yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian /kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan, antara lain :

NO	URAIAN	RELEVANSI	FORMULASI	SUMBER DATA
1	Jumlah paket pakaian dinas dan atribut kelengkapan kepala daerah dan wakil kepa daerah yang diesdiakan	Indikator Jumlah paket pakaian dinas dan atribut kelengkapan kepala daerah dan wakil kepa daerah yang disediakan dinilai relevan apabila kegiatan atau programnya terkait langsung dengan pengadaan barang kebutuhan protokoler atau penunjang tugas kepala daerah dan wakil kepala daerah.	*Jumlah paket yang disediakan*	Bagian umum

Target Kinerja

Dalam perjanjian kinerja ini, setiap indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut :

INDIKATOR KINERJA	TARGET	PENJELASAN
Jumlah paket pakaian dinas dan atribut kelengkapan kepala daerah dan wakil kepa daerah yang diesdiakan	9	Target ini ditetapkan dengan melihat capaian beberapa tahun sebelumnya, dimana capaian tahun 2023 sebesar 10 capaian tahun 2024 sebesar 10, maka target rata ditetapkan 9

Lampiran 2 Perjanjian Kinerja

SEKRETARIAT DAERAH
PENJELASAN KINERJA
TAHUN 2025

Penjelasan Kinerja 6

Uraian Sasaran/

Yang dimaksud dalam sasaran kinerja ini mengacu pada proses dan hasil dari pelaksanaan kegiatan yang bertujuan untuk mendukung operasional administrasi suatu instansi.

Indikator Kinerja

Sasaran kinerja ini memiliki 1 (satu) Indikator kinerja yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian /kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan, antara lain :

NO	URAIAN	RELEVANSI	FORMULASI	SUMBER DATA
1	Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Indikator Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan bisa relevan jika indicator ini mendukung tujuan strategis, khusunya yang terkait dengan pengelolaan sarana dan prasarana atau layanan administrasi perkantoran.	*Jumlah laporan*	Bagian umum

Target Kinerja

Dalam perjanjian kinerja ini, setiap indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut :

INDIKATOR KINERJA	TARGET	PENJELASAN
Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	5	Target ini ditetapkan dengan melihat capaian beberapa tahun sebelumnya, dimana capaian tahun 2023 sebesar 5 capaian tahun 2024 sebesar 5, maka target rata ditetapkan 5

SEKRETARIAT DAERAH
PENJELASAN KINERJA
TAHUN 2025

Penjelasan Kinerja 7

Uraian Sasaran/

Yang dimaksud dalam sasaran kinerja ini berfocus pada pengelolaan dan pemeliharaan kendaraan yang digunakan dalam menjalankan tugas dinas atau jabatan. Pemeliharaan kendaraan bertujuan untuk menjaga agar kendaraan tetap berfungsi dengan baik dan aman digunakan untuk mendukung kelancaran operasional. Biaya pemeliharaan adalah anggaran yang dialokasikan untuk menutupi pengeluaran terkait pemeliharaan kendaraan dinas.

Indikator Kinerja

Sasaran kinerja ini memiliki 1 (satu) Indikator kinerja yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian /kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan, antara lain :

NO	URAIAN	RELEVANSI	FORMULASI	SUMBER DATA
1	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayar pajaknya	Indikator Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayar pajaknya bisa relevan dalam konteks evaluasi efisiensi pengelolaan aset pemeliharaan atau Lembaga, terutama dala hal pemeliharaan dan kepatuhan terhadap kewajiban perpajakan, Namun relevan nya tergantung pada tujuan yang ingin	*Jumlah kendaraan dinas*	Bagian umum

		dicapai, seperti efisiensi anggaran, kepatuhan hukum atau tingkat layanan kepada pegawai.		

Target Kinerja

Dalam perjanjian kinerja ini, setiap indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut :

INDIKATOR KINERJA	TARGET	PENJELASAN
Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayar pajaknya	3	Target ini ditetapkan dengan melihat capaian beberapa tahun sebelumnya , dimana capaian tahun 2023 sebesar 3 capaian tahun 2024 sebesar 3, maka target rata ditetapkan 3

SEKRETARIAT DAERAH
PENJELASAN KINERJA
TAHUN 2025

Penjelasan Kinerja 8

Uraian Sasaran/

Yang dimaksud dalam sasaran kinerja ini berfocus pada pengelolaan dan pemeliharaan kendaraan yang digunakan dalam menjalankan tugas dinas atau jabatan. Pemeliharaan kendaraan bertujuan untuk menjaga agar kendaraan tetap berfungsi dengan baik dan aman digunakan untuk mendukung kelancaran operasional. Biaya pemeliharaan adalah anggaran yang dialokasikan untuk menutupi pengeluaran terkait pemeliharaan kendaraan dinas.

Indikator Kinerja

Sasaran kinerja ini memiliki 1 (satu) Indikator kinerja yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian /kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan, antara lain :

NO	URAIAN	RELEVANSI	FORMULASI	SUMBER DATA
1	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayar pajaknya	Indikator Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayar pajaknya bisa relevan dalam konteks evaluasi efisiensi pengelolaan aset pemeliharaan atau Lembaga, terutama dala hal pemeliharaan dan kepatuhan terhadap kewajiban perpajakan, Namun relevan nya tergantung pada tujuan yang ingin dicapai, seperti	*Jumlah kendaraan dinas*	Bagian umum

		efisiensi anggaran, kepatuhan hukum atau tingkat layanan kepada pegawai.		

Target Kinerja

Dalam perjanjian kinerja ini, setiap indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut :

INDIKATOR KINERJA	TARGET	PENJELASAN
Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayar pajaknya	20	Target ini ditetapkan dengan melihat capaian beberapa tahun sebelumnya, dimana capaian tahun 2023 sebesar 20 capaian tahun 2024 sebesar 20, maka target rata ditetapkan 20

SEKRETARIAT DAERAH
PENJELASAN KINERJA
TAHUN 2025

Penjelasan Kinerja 9

Uraian Sasaran/

Yang dimaksud dalam sasaran kinerja ini mengacu pada upaya yang dilakukan untuk menjaga dan meningkatkan kondisi fisik Gedung kantor dan bangunan terkait agar tetap layak pakai, aman, serta mendukung kelancaran operasional.

Indikator Kinerja

Sasaran kinerja ini memiliki 1 (satu) Indikator kinerja yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian /kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan, antara lain :

NO	URAIAN	RELEVANSI	FORMULASI	SUMBER DATA
1	Jumlah Gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Indikator Jumlah Gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi relevan jika digunakan untuk mengukur pencapaian kegiatan yang terkait dengan pemeliharaan dan rehabilitasi aset fisik. Namun relevansi indicator ini tergantung pada konteks tujuan yang ingin dicapai, seperti efisiensi penggunaan anggaran pemeliharaan, peningkatan kualitas fasilitas, atau optimalisasi aset pemerintah.	*Jumlah Gedung yang di pelihara*	Bagian umum

Target Kinerja

Dalam perjanjian kinerja ini, setiap indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut :

INDIKATOR KINERJA	TARGET	PENJELASAN
Jumlah Gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	3	Target ini ditetapkan dengan melihat capaian beberapa tahun sebelumnya dimana capaian tahun 2023 sebesar 3 capaian tahun 2024 sebesar 3, maka target rata ditetapkan 3

SEKRETARIAT DAERAH
PENJELASAN KINERJA
TAHUN 2025

Penjelasan Kinerja 10

Uraian Sasaran/

Yang dimaksud dalam sasaran kinerja ini merujuk pada pelaksanaan aktivitas yang mendukung operasional kantor agar berjalan dengan lancar dan efektif.

Indikator Kinerja

Sasaran kinerja ini memiliki 1 (satu) Indikator kinerja yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian /kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan, antara lain :

NO	URAIAN	RELEVANSI	FORMULASI	SUMBER DATA
1	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	Indikator Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan bisa relevan tergantung pada tujuan organisasi dan sasaran yang ingin dicapai.	*Jumlah laporan*	Bagian umum

Target Kinerja

Dalam perjanjian kinerja ini, setiap indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut :

INDIKATOR KINERJA	TARGET	PENJELASAN
Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	12	Target ini ditetapkan dengan melihat capaian beberapa tahun sebelumnya dimana capaian tahun 2023 sebesar 12 capaian tahun 2024 sebesar 12, maka target rata ditetapkan 12

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN
SEKRETARIAT DAERAH
TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : LYNIE WIDIASIE, SE

Jabatan : ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA

Selanjutnya disebut *Pihak Pertama*

Nama : MUHAMMAD YATIMAN, S.IP. M.Si

Jabatan : KEPALA BAGIAN UMUM

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut *Pihak Kedua*

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Tana Paser, 20 Oktober 2025

Pihak Kedua	Pihak Pertama,
KEPALA BAGIAN UMUM	ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA
MUHAMMAD YATIMAN, S.IP. M.Si	**LYNIE WIDIASIE, SE**
NIP. 19870401 200701 1 001	NIP. 19790521 200102 2 004

Lampiran 1 Perjanjian Kinerja

SEKRETARIAT DAERAH
TABEL PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN
TAHUN 2025

NO	SASARAN KINERJA SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	1 Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	25 paket
2	Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	2 Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	150 laporan
3	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	3 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan
4	Tersedianya Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	4 Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan	12 paket
5	Terlaksananya Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	5 Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	12 paket
6	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	6 Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan	12 Paket

NO	SUB KEGIATAN	ANGGARAN	
1	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Rp.	250.000.000
2	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Rp.	5.125.030.915
3	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp.	5.723.157.699
4	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Rp.	2.654.410.650
5	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Rp.	2.491.267.310
6	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretaris Daerah	Rp.	600.000.000

Tana Paser, 20 Oktober 2025

Pihak Kedua
KEPALA BAGIAN UMUM

MUHAMMAD YATIMAN, S.IP. M.Si
NIP. 19870401 200701 1 001

Pihak Pertama,
ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA

LYNIE WIDIASIE, SE
NIP. 19790521 200102 2 004

Lampiran 2 Perjanjian Kinerja

SEKRETARIAT DAERAH
PENJELASAN KINERJA
TAHUN 2025

Penjelasan Kinerja 1

Uraian Sasaran/

Yang dimaksud dalam sasaran kinerja ini biasanya mengacu pada pelaksanaan program yang bertujuan untuk mendukung kebutuhan operasional rumah tangga pada institusi pemerintah.

Indikator Kinerja

Sasaran kinerja ini memiliki 1 (satu) Indikator kinerja yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian /kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan, antara lain :

NO	URAIAN	RELEVANSI	FORMULASI	SUMBER DATA
1	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Indikator Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan dapat relevan jika sesuai dengan tujuan dan sasaran sub kegiatan tertentu.	*Jumlah paket yang disediakan*	Bagian umum

Target Kinerja

Dalam perjanjian kinerja ini, setiap indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut :

INDIKATOR KINERJA	TARGET	PENJELASAN
Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	25	Target ini ditetapkan dengan melihat capaian beberapa tahun sebelumnya dimana capaian tahun 2022 sebesar 25 capaian tahun 2023 sebesar 25, maka target rata ditetapkan 25

SEKRETARIAT DAERAH
PENJELASAN KINERJA
TAHUN 2025

Penjelasan Kinerja 2

Uraian Sasaran/

Yang dimaksud dalam sasaran kinerja ini mengacu pada pelaksanaan dan pencapaian tugas yang berkaitan dengan penyediaan layanan dan dukungan untuk kunjungan tamu, baik dari dalam negeri maupun luar negeri, yang berhubungan dengan kepentingan institusi atau pemerintah.

Indikator Kinerja

Sasaran kinerja ini memiliki 1 (satu) Indikator kinerja yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian /kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan, antara lain :

NO	URAIAN	RELEVANSI	FORMULASI	SUMBER DATA
1	Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	Indikator Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu bisa relevan tergantung pada konteks organisasi dan tujuan yang ingin dicapai, jika tugas utama unit kerja terkait adalah memberikan layanan fasilitasi kunjungan tamu maka indicator ini relevan, namun jika tugas utama lebih pada hasil dari kunjungan (contoh Penandatanganan MoU) maka indicator ini kurang relevan.	*Jumlah Laporan*	Bagian umum

Target Kinerja

Dalam perjanjian kinerja ini, setiap indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut :

INDIKATOR KINERJA	TARGET	PENJELASAN
Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	150	Target ini ditetapkan dengan melihat capaian beberapa tahun sebelumnya dimana capaian tahun 2022 sebesar 150 capaian tahun 2023 sebesar 150, maka target rata ditetapkan 150

SEKRETARIAT DAERAH
PENJELASAN KINERJA
TAHUN 2025

Penjelasan Kinerja 3

Uraian Sasaran/

Yang dimaksud dalam sasaran kinerja ini merujuk pada aktivitas yang mendukung operasional organisasi pemerintah atau instansi dalam memastikan kebutuhan dasar komunikasi, air, dan listrik dapat terpenuhi dengan baik. Sub ini seringkali mencakup pengelolaan, pengadaan, dan pembiayaan layanan..

Indikator Kinerja

Sasaran kinerja ini memiliki 1 (satu) Indikator kinerja yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian /kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan, antara lain :

NO	URAIAN	RELEVANSI	FORMULASI	SUMBER DATA
1	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air, dan listrik yang disediakan	Indicator Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air, dan listrik yang disediakan bisa relevan jika indicator tersebut dirancang untuk mengukur sejauh mana pelayanan yang diberikan sudah memenuhi kebutuhan masyarakat atau organisasi yang dilayani.	*Jumlah Laporan*	Bagian umum

Target Kinerja

Dalam perjanjian kinerja ini, setiap indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut :

INDIKATOR KINERJA	TARGET	PENJELASAN
Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air, dan listrik yang disediakan	12	Target ini ditetapkan dengan melihat capaian beberapa tahun sebelumnya dimana capaian tahun 2022 sebesar 12 capaian tahun 2023 sebesar 12, maka target rata ditetapkan 12

SEKRETARIAT DAERAH
PENJELASAN KINERJA
TAHUN 2025

Penjelasan Kinerja 4

Uraian Sasaran/

Yang dimaksud dalam sasaran kinerja ini merujuk pada pelaksanaan tugas yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan operasional dan administrasi rumah tangga kepala daerah. Hal ini mencakup penyediaan sarana, prasarana, dan fasilitas yang mendukung kelancaran tugas serta kenyamanan kepala daerah dalam melaksanakan fungsinya..

Indikator Kinerja

Sasaran kinerja ini memiliki 1 (satu) Indikator kinerja yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian /kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan, antara lain :

NO	URAIAN	RELEVANSI	FORMULASI	SUMBER DATA
1	Jumlah paket kebutuhan rumah tangga kepala daerah yang disediakan	Indicator Jumlah paket kebutuhan rumah tangga kepala daerah yang disediakan dapat relevan dalam konteks tertentu, terutama jika indicator tersebut digunakan untuk mengukur efisiensi, efektivitas atau kepatuhan administrasi dalam penyediaan kebutuhan rumah tangga kepala daerah. Namun relevansinya tergantung pada tujuan yang ingin dicapai dan konteks kebijakan yang diterapkan. Jika tujuan indicator ini adalah memastikan kebutuhan rumah tangga kepala daerah tersedia sesuai aturan indicator ini relevan	*Jumlah Laporan*	Bagian umum

Target Kinerja

Dalam perjanjian kinerja ini, setiap indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut :

INDIKATOR KINERJA	TARGET	PENJELASAN
Jumlah paket kebutuhan rumah tangga kepala daerah yang disediakan	12	Target ini ditetapkan dengan melihat capaian beberapa tahun sebelumnya dimana capaian tahun 2022 sebesar 12 capaian tahun 2023 sebesar 12, maka target rata ditetapkan 12

SEKRETARIAT DAERAH
PENJELASAN KINERJA
TAHUN 2025

Penjelasan Kinerja 5

Uraian Sasaran/

Yang dimaksud dalam sasaran kinerja ini merujuk pada pelaksanaan tugas yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan operasional dan administrasi rumah tangga kepala daerah. Hal ini mencakup penyediaan sarana, prasarana, dan fasilitas yang mendukung kelancaran tugas serta kenyamanan wakil kepala daerah dalam melaksanakan fungsinya..

Indikator Kinerja

Sasaran kinerja ini memiliki 1 (satu) Indikator kinerja yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian /kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan, antara lain :

NO	URAIAN	RELEVANSI	FORMULASI	SUMBER DATA
1	Jumlah paket kebutuhan rumah tangga wakil kepala daerah yang disediakan	Indicator Jumlah paket kebutuhan rumah tangga wakil kepala daerah yang disediakan dapat relevan dalam konteks tertentu, terutama jika indicator tersebut digunakan untuk mengukur efisiensi, efektivitas atau kepatuhan administrasi dalam penyediaan kebutuhan rumah tangga kepala daerah. Namun relevansinya tergantung pada tujuan yang ingin dicapai dan konteks kebijakan yang diterapkan. Jika tujuan indicator ini adalah memastikan kebutuhan rumah tangga kepala daerah tersedia sesuai aturan indicator ini relevan	*Jumlah Laporan*	Bagian umum

Target Kinerja

Dalam perjanjian kinerja ini, setiap indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut :

INDIKATOR KINERJA	TARGET	PENJELASAN
Jumlah paket kebutuhan rumah tangga wakil kepala daerah yang disediakan	12	Target ini ditetapkan dengan melihat capaian beberapa tahun sebelumnya dimana capaian tahun 2022 sebesar 12 capaian tahun 2023 sebesar 12, maka target rata ditetapkan 12

SEKRETARIAT DAERAH
PENJELASAN KINERJA
TAHUN 2025

Penjelasan Kinerja 6

Uraian Sasaran/

Yang dimaksud dalam sasaran kinerja ini merujuk pada pelaksanaan tugas yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan operasional dan administrasi rumah tangga kepala daerah. Hal ini mencakup penyediaan sarana, prasarana, dan fasilitas yang mendukung kelancaran tugas serta kenyamanan Sekretaris Daerah dalam melaksanakan fungsinya..

Indikator Kinerja

Sasaran kinerja ini memiliki 1 (satu) Indikator kinerja yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian /kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan, antara lain :

NO	URAIAN	RELEVANSI	FORMULASI	SUMBER DATA
1	Jumlah paket kebutuhan rumah tangga Sekretaris Daerah yang disediakan	Indicator Jumlah paket kebutuhan rumah tangga Sekretaris Daerah yang disediakan dapat relevan dalam konteks tertentu, terutama jika indicator tersebut digunakan untuk mengukur efisiensi, efektivitas atau kepatuhan administrasi dalam penyediaan kebutuhan rumah tangga kepala daerah. Namun relevansinya tergantung pada tujuan yang ingin dicapai dan konteks kebijakan yang diterapkan. Jika tujuan indicator ini adalah memastikan kebutuhan rumah tangga kepala daerah tersedia sesuai aturan indicator ini relevan	*Jumlah Laporan*	Bagian umum

Target Kinerja

Dalam perjanjian kinerja ini, setiap indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut :

INDIKATOR KINERJA	TARGET	PENJELASAN
Jumlah paket kebutuhan rumah tangga sekretaris daerah yang disediakan	12	Target ini ditetapkan dengan melihat capaian beberapa tahun sebelumnya dimana capaian tahun 2022 sebesar 12 capaian tahun 2023 sebesar 12, maka target rata ditetapkan 12

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN
SEKRETARIAT DAERAH
TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ZUHAIRINA, SH, MM

Jabatan : KEPALA BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN

Selanjutnya disebut *Pihak Pertama*

NAMA : NUR ASNI, SE. MM

JABATAN : PLT. ASISTEN ADMINISTRASI UMUM

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut *Pihak Kedua*

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Tana Paser, 20 Oktober 2025

Pihak Kedua	Pihak Kedua
PLT. ASISTEN ADMINISTRASI UMUM	KEPALA BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN
NUR ASNI, SE, MM	**ZUHAIRINA, SH, MM**
NIP. 19721215 199803 2 008	NIP. 19680514 199403 2 005

Lampiran 1 Perjanjian Kinerja

SEKRETARIAT DAERAH
TABEL PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN
TAHUN 2025

NO	SASARAN KINERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA		TARGET
1	2	3		4
1	Perencanaan,Penganggaran,dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1	Persentase fasilitasi dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja	100
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3	Tingkat Kepuasan Pelayanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100
3	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	4	Persentase Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang difasilitasi	100 Persen
4	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12 Lap

NO	KEGIATAN		ANGGARAN
1	Perencanaan,Penganggaran,dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah a. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD)	Rp.	809.265.822
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp.	44.012.239.788
3	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Rp.	1.007.465.688

Tana Paser, 20 Oktober 2025

Pihak Kedua		Pihak Kedua
PLT. ASISTEN ADMINISTRASI UMUM		KEPALA BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN
NUR ASNI, SE, MM		**ZUHAIRINA, SH, MM**
NIP. 19721215 199803 2 008		NIP. 19680514 199403 2 005

Lampiran 2 Perjanjian Kinerja

SEKRETARIAT DAERAH
PENJELASAN KINERJA
TAHUN 2025

Penjelasan Kinerja 1

Uraian Sasaran/

Yang dimaksud dalam sasaran kinerja ini adalah Kinerja ini bertujuan untuk memastikan semua kegiatan dan sub kegiatan selaras dengan visi dan misi kepala daerah, serta mendukung pembangunan daerah, serta menganggarkan dana agar sesuai dengancapaian target yang telah di rencanakan, melakukan evaluasi untuk dapat melakukan perbaikan dalam proses perencanaan dan penganggaran kedepannya sehingga dapat terjadi peningkatan kinerja secara berkesinambungan

Indikator Kinerja

Sasaran kinerja ini memiliki 1 (satu) Indikator kinerja yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian /kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan, antara lain :

NO	URAIAN	RELEVANSI	FORMULASI	SUMBER DATA
1	Persentase fasilitasi dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja	Indicator kinerja Persentase fasilitasi dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja bisa relevan, terutama dalam konteks organisasi yang ingin memastikan seluruh proses perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja telah difasilitasi sesuai target. Indikator ini membantu mengukur seberapa baik peran fasilitasi dalam memastikan	*Jumlah dokumen yang difasilitasi dibagi jumlah dokumen yang direncanakan kali 100*	Bagian Perencanaan

		dokumen-dokumen tersebut tersusun dengan baik dan sesuai jadwal		

Target Kinerja

Dalam perjanjian kinerja ini, setiap indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut :

INDIKATOR KINERJA	TARGET	PENJELASAN
Persentase fasilitasi dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja	100 %	Target ini ditetapkan dengan melihat capaian beberapa tahun sebelumnya, dimana capaian tahun 2023 sebesar 100%, capaian tahun 2024 sebesar 100%, maka target rata ditetapkan 100 %

Lampiran 2 Perjanjian Kinerja

SEKRETARIAT DAERAH
PENJELASAN KINERJA
TAHUN 2025

Penjelasan Kinerja 2

Uraian Sasaran/

Yang dimaksud dalam sasaran kinerja ini adalah Kinerja ini bertujuan untuk memastikan semua pengelolaan anggaran dapat digunakan secara efektif dan efisien dan kegiatan ini mencakup seluruh proses mulai perencanaan, pengelolaan hingga pelpaoran keuangan sesuai dengan aturan yang berlaku. Ada beberapa aspek yang perlu diperhatikan dalam kinerja administrasi keuangan antara lain; - Penganggaran, Pengelolaan, - Pengendalian Internal-Pelaporan, serta audit atau evaluasi

Indikator Kinerja

Sasaran kinerja ini memiliki 1 (satu) Indikator kinerja yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian /kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan, antara lain :

NO	URAIAN	RELEVANSI	FORMULASI	SUMBER DATA
1	Tingkat Kepuasan Pelayanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Indicator kinerja Tingkat Kepuasan Pelayanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah sangat relevan, terutama untuk mengukur kualitas layanan yang diberikan oleh unit administrasi keuangan. Tingkat kepuasan ini penting sebagai tolok ukur keberhasilan pelayanan keuangan sekretariat daerah, baik dari segi ketepatan waktu,	Hasil Survey	Bagian Perencanaan

		akurasi maupun keseusian dengan aturan		

Target Kinerja

Dalam perjanjian kinerja ini, setiap indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut :

INDIKATOR KINERJA	TARGET	PENJELASAN
Tingkat Kepuasan Pelayanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100	Target ini ditetapkan dengan melihat capaian beberapa tahun sebelumnya, dimana capaian tahun 2023 sebesar 100, capaian tahun 2024 sebesar 100, maka target rata ditetapkan 100

SEKRETARIAT DAERAH
PENJELASAN KINERJA
TAHUN 2025

Penjelasan Kinerja 3

Yang dimaksud dalam sasaran kinerja ini adalah Kinerja ini bertujuan untuk mendukung kegiatan operasional KDH/WKDH dalam melaksanakan tugas tugas yang mendukung fungsi dan layanan public dalam keberhasilan program program yang berorientasi pada kesejahteraan rakyat

Indikator Kinerja

Sasaran kinerja ini memiliki 1 (satu) Indikator kinerja yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian /kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan, antara lain :

NO	URAIAN	RELEVANSI	FORMULASI	SUMBER DATA
1	Persentase Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang difasilitasi	Indicator kinerja Persentase Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang difasilitasi cukup relevan terutma untuk memastikan akuntabilitas dan efektivitas penggunaan anggaran public.	*Total biaya admininistrasi dan operasional di bagi total anggaran yang dikelola dikali 100*	Bagian Perencanaan

Target Kinerja

Dalam perjanjian kinerja ini, setiap indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut :

INDIKATOR KINERJA	TARGET	PENJELASAN
Persentase Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang difasilitasi	100	Target ini ditetapkan dengan melihat capaian beberapa tahun sebelumnya, dimana capaian tahun 2023 sebesar 100, capaian tahun 2024 sebesar 100, maka target rata ditetapkan 100

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN
SEKRETARIAT DAERAH
TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : RUSLINAWATI, SE, M.SI

Jabatan : PERENCANA AHLI MUDA

Selanjutnya disebut *Pihak Pertama*

Nama : ZUHAIRINA, SH, MM

Jabatan : KEPALA BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut *Pihak Kedua*

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Tana Paser, 2 0 Oktober 2025

Pihak Kedua	Pihak Pertama
KEPALA BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN	PERENCANA AHLI MUDA
ZUHAIRINA, SH, MM	**RUSLINAWATI, SE, M.Si**
NIP. 19680514 199403 2 005	NIP. 19771206 200212 2 006

Lampiran 1 Perjanjian Kinerja

SEKRETARIAT DAERAH
TABEL PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN
TAHUN 2025

NO	SASARAN KINERJA SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	9 Dokumen
2	Koordinasi dan penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Jumlah Dokumen RKA - SKPD dan laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA SKPD	12 Dokumen

NO	SUB KEGIATAN		ANGGARAN
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Rp.	630.532.601
2	Koordinasi dan penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Rp.	92.843.692

Tana Paser, 20 Oktober 2025

Pihak Kedua	Pihak Pertama
KEPALA BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN	PERENCANA AHLI MUDA
ZUHAIRINA, SH, MM	**RUSLINAWATI, SE, M.Si**
NIP. 19680514 199403 2 005	NIP. 19771206 200212 2 006

SEKRETARIAT DAERAH
PENJELASAN KINERJA
TAHUN 2025

Penjelasan Kinerja 1

Uraian Sasaran/

Yang dimaksud dalam sasaran kinerja ini adalah upaya untuk memastikan bahwa rencana pembangunan di tingkat perangkat daerah dapat disusun, diimplementasikan dan dipantau sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Kegiatan ini mencakup penyusunan berbagai dokumen perencanaan, seperti RKPD, Renstra, dan Renja PD yang menjadi pedoman dalam menjalankan program serta kegiatan di masing masing PD.

Indikator Kinerja

Sasaran kinerja ini memiliki 1 (satu) Indikator kinerja yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian /kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan, antara lain :

NO	URAIAN	RELEVANSI	FORMULASI	SUMBER DATA
1	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Indicator Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah bisa di anggap relevan apabila tujuan yang ingin dicapai adalah memastikan PD telah memiliki dokumen perencanaan yang memadai sebagai dasar dalam pelaksanaan program dan kegiatan. Namun indicator ini juga memiliki keterbatasan jika hanya berfokus pada jumlah	*Jumlah dokumen*	Bagian Perencanaan

		dokumen, maka belum tentu menggambarkan kualitas, keefektifan atau kesesuaian dokumen perencanaan tersebut dengan kebutuhan dan target pembangunan.		

Target Kinerja

Dalam perjanjian kinerja ini, setiap indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut :

INDIKATOR KINERJA	TARGET	PENJELASAN
Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	9	Target ini ditetapkan dengan melihat capaian beberapa tahun sebelumnya, dimana capaian tahun 2023 sebesar 6, capaian tahun 2024 sebesar 6, maka target rata ditetapkan 9

SEKRETARIAT DAERAH
PENJELASAN KINERJA
TAHUN 2025

Penjelasan Kinerja 2

Uraian Sasaran/

Yang dimaksud dalam sasaran kinerja ini adalah Proses yang bertujuan memastikan bahwa perencanaan anggaran dan kebutuhan tiap unit kerja pemerintah daerah sesuai dengan prioritas pembangunan daerah, serta dilaksanakan secara terkoordinasi dan efisien.

Indikator Kinerja

Sasaran kinerja ini memiliki 1 (satu) Indikator kinerja yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian /kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan, antara lain :

NO	URAIAN	RELEVANSI	FORMULASI	SUMBER DATA
1	Jumlah Dokumen RKA - SKPD dan laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA SKPD	Indicator Jumlah Dokumen RKA - SKPD dan laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA SKPD sebaiknya memenuhi prinsip relevansi, yaitu benar-benar mencerminkan aspek kinerja yang diukur Berikut adalah analisi mengenai relevansi dan formulasi perhitungannya; jumlah dokumen RKA SKPD, hasil koordinasi penyusunan dokumen RKA SKPD.	*Jumlah dokumen*	Bagian Perencanaan

Target Kinerja

Dalam perjanjian kinerja ini, setiap indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut :

INDIKATOR KINERJA	TARGET	PENJELASAN
Jumlah Dokumen RKA - SKPD dan laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA SKPD	12	Target ini ditetapkan dengan melihat capaian beberapa tahun sebelumnya, dimana capaian tahun 2023 sebesar 12, capaian tahun 2024 sebesar 12, maka target rata ditetapkan 12

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN
SEKRETARIAT DAERAH
TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : SRI NURVIDA, SP

Jabatan : ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA

Selanjutnya disebut *Pihak Pertama*

Nama : ZUHAIRINA, SH, MM

Jabatan : KEPALA BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut *Pihak Kedua*

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Tana Paser, 2 0 Oktober 2025

Pihak Kedua	Pihak Pertama
KEPALA BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN	ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA
ZUHAIRINA, SH, MM	**SRI NURVIDA, SP**
NIP. 19680514 199403 2 005	NIP. 19711121 200701 2 014

Lampiran 1 Perjanjian Kinerja

SEKRETARIAT DAERAH
TABEL PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN
TAHUN 2025

NO	SASARAN KINERJA SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	1 Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	4284 Orang/Bulan
2	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	2 Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	725 Dokumen
3	Tersedianya Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	3 Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	28 Orang/Bulan
4	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Laporan keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	4 Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	12 Dokumen
5	Tersedianya Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	5 Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	12 Orang/Bulan
6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	6 Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 Laporan

NO	KEGIATAN	ANGGARAN
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	42.949.301.742
2	Pelaksanaan Penatausahaan dan pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	865746806
3	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Derah dan Wakil Kepala Daerah	407.465.688
4	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	600.000.000
5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	23.038.051
6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	174.153.189

Tana Paser, 20 Oktober 2025

Pihak Kedua	Pihak Pertama
KEPALA BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN	ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA
ZUHAIRINA, SH, MM	**SRI NURVIDA, SP**
NIP. 19680514 199403 2 005	NIP. 19711121 200701 2 014

Lampiran 2 Perjanjian Kinerja

SEKRETARIAT DAERAH
PENJELASAN KINERJA
TAHUN 2025

Penjelasan Kinerja 1

Uraian Sasaran/

Yang dimaksud dalam sasaran kinerja ini berhubungan dengan proses pengelolaan keuangan dan sumber daya manusia oleh pemerintah untuk memastikan kesejahteraan pegawai negeri berikut adalah beberapa aspek yang menjelaskan kinerja ini; Penganggaran yang efektif, ketepatam waktu pembayaran, system manajemen kepegawaian, kebijakan tunjangan kinerja..

Indikator Kinerja

Sasaran kinerja ini memiliki 1 (satu) Indikator kinerja yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian /kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan, antara lain :

NO	URAIAN	RELEVANSI	FORMULASI	SUMBER DATA
1	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Indicator Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN bisa relevan jika digunakan untuk mengukur efisiensi, pengelolaan anggaran, atau tingkat kesejahteraan pegawai disuatu instansi pemerintah. Namun indicator ini perlu dipadukan dengan indicator lainnya untuk memberikan gambaran yang lebih lengkap tentang kinerja ASN.	*Jumlah asn yang menerima gaji*	Bagian Perencanaan

Target Kinerja

Dalam perjanjian kinerja ini, setiap indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut :

INDIKATOR KINERJA	TARGET	PENJELASAN
Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4284	Target ini ditetapkan dengan melihat capaian beberapa tahun sebelumnya, dimana capaian tahun 2023 sebesar 6, capaian tahun 2024 sebesar 6, maka target rata ditetapkan 4284

SEKRETARIAT DAERAH
PENJELASAN KINERJA
TAHUN 2025

Penjelasan Kinerja 2

Uraian Sasaran/

Yang dimaksud dalam sasaran kinerja ini adalah bertujuan untuk memastikan kelancaran dan keakuratan pengelolaan keuangan pada tingkat SKPD.

Indikator Kinerja

Sasaran kinerja ini memiliki 1 (satu) Indikator kinerja yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian /kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan, antara lain :

NO	URAIAN	RELEVANSI	FORMULASI	SUMBER DATA
1	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Indicator Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD indicator ini perlu di tinjau lebih lanjut dari segi relevansi dan formulasi perhitungannya. Indikator yang mengukur jumlah dokumen bisa menjadi kurang relevan jika kerja yang diinginkan lebih terkait dengan kualitas dan verifikasi keuangan.. Indikator bisa relevan jika mempertimbangkan kepatuhan terhadap prosedur, waktu penyelesaian pengujian/verifikasi atau tingkat kesalahan dalam dokumen yang ditinjau	*Jumlah dokumen*	Bagian Perencanaan

Target Kinerja

Dalam perjanjian kinerja ini, setiap indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut :

INDIKATOR KINERJA	TARGET	PENJELASAN
Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	725	Target ini ditetapkan dengan melihat capaian beberapa tahun sebelumnya, dimana capaian tahun 2023 sebesar 725, capaian tahun 2024 sebesar 725, maka target rata ditetapkan 725

SEKRETARIAT DAERAH
PENJELASAN KINERJA
TAHUN 2025

Penjelasan Kinerja 3

Uraian Sasaran/

Yang dimaksud dalam sasaran kinerja ini merupakan bagian dari manajemen keuangan pemerintah daerah yang focus pada pemenuhan hak-hak keuangan pimpinan daerah.

Indikator Kinerja

Sasaran kinerja ini memiliki 1 (satu) Indikator kinerja yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian /kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan, antara lain :

NO	URAIAN	RELEVANSI	FORMULASI	SUMBER DATA
1	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Indicator Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah untuk relevansi indicator ini tergantung pada tujuan pengukuran yang hendak di capai. Indicator ini relevan jika dipakai untuk mengukur kepatuhan administrasi terkait pencairan dan tunjangan. Kurang relevan jika digunakan untuk menilai kinerja efektif atau efisien	*Jumlah orang*	Bagian Perencanaan

Target Kinerja

Dalam perjanjian kinerja ini, setiap indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut :

INDIKATOR KINERJA	TARGET	PENJELASAN
Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	28	Target ini ditetapkan dengan melihat capaian beberapa tahun sebelumnya, dimana capaian tahun 2023 sebesar 28, capaian tahun 2024 sebesar 28, maka target rata ditetapkan 28

SEKRETARIAT DAERAH
PENJELASAN KINERJA
TAHUN 2025

Penjelasan Kinerja 4

Uraian Sasaran/

Yang dimaksud dalam sasaran kinerja ini merujuk pada berbagai aktifitas yang mendukung pelaporan keuangan secara teratur dan akurat ditingkat instansi pemerintah daerah.

Indikator Kinerja

Sasaran kinerja ini memiliki 1 (satu) Indikator kinerja yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian /kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan, antara lain :

NO	URAIAN	RELEVANSI	FORMULASI	SUMBER DATA
1	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Indicator Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD bisa relevan juka difokuskan pada aspek kualitas dan ketepatan waktu. Indikator ini akan membantu mengukur efektivitas proses pengelolaan laporan keuangan serta koordinasi antar bagian dalam SKPD	*Jumlah dokumen*	Bagian Perencanaan

Target Kinerja

Dalam perjanjian kinerja ini, setiap indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut :

INDIKATOR KINERJA	TARGET	PENJELASAN
Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	12	Target ini ditetapkan dengan melihat capaian beberapa tahun sebelumnya, dimana capaian tahun 2023 sebesar 12, capaian tahun 2024 sebesar 12, maka target rata ditetapkan 12

SEKRETARIAT DAERAH
PENJELASAN KINERJA
TAHUN 2025

Penjelasan Kinerja 5

Uraian Sasaran/

Yang dimaksud dalam sasaran kinerja ini adalah upaya untuk memastikan bahwa dana yang dialokasikan untuk operasional pejabat daerah tersebut digunakan secara efektif, efisien dan akuntabel sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dana ini biasanya mencakup biaya yang diperlukan untuk mendukung kegiatan sehari-hari dalam menjalankan tugas kepemimpinan.

Indikator Kinerja

Sasaran kinerja ini memiliki 1 (satu) Indikator kinerja yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian /kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan, antara lain :

NO	URAIAN	RELEVANSI	FORMULASI	SUMBER DATA
1	Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Indicator Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah kurang relevan karena indicator ini lebih menitik beratkan pada aspek administrasiatau kuantitas penerima dana, bukan pada kualitas atau dampak pengguna dana tersebut terhadap kinerja kepala daerah.	*Jumlah orang yang menerima dana operasional*	Bagian Perencanaan

Target Kinerja

Dalam perjanjian kinerja ini, setiap indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut :

INDIKATOR KINERJA	TARGET	PENJELASAN
Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	12	Target ini ditetapkan dengan melihat capaian beberapa tahun sebelumnya, dimana capaian tahun 2023 sebesar 12, capaian tahun 2024 sebesar 12, maka target rata ditetapkan 12

SEKRETARIAT DAERAH
PENJELASAN KINERJA
TAHUN 2025

Penjelasan Kinerja 6

Uraian Sasaran/

Yang dimaksud dalam sasaran kinerja ini adalah suatu Langkah atau proses yang melibatkan berbagai Langkah dan aktivitas untuk memastikan laporan keuangan akhir tahun yang akurat, tepat waktu, dan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Indikator Kinerja

Sasaran kinerja ini memiliki 1 (satu) Indikator kinerja yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian /kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan, antara lain :

NO	URAIAN	RELEVANSI	FORMULASI	SUMBER DATA
1	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Indicator Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD bisa relevan jika dimaksudkan untuk mengukur ketepatan waktu, kualitas dan koordinasi dalam penyusunan laporan keuangan instansi pemerintah	*Jumlah laporan keuangan*	Bagian Perencanaan

Target Kinerja

Dalam perjanjian kinerja ini, setiap indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut :

INDIKATOR KINERJA	TARGET	PENJELASAN
Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2	Target ini ditetapkan dengan melihat capaian beberapa tahun sebelumnya, dimana capaian tahun 2023 sebesar 2, capaian tahun 2024 sebesar 2, maka target rata ditetapkan 2